

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA CIMAHI

2020

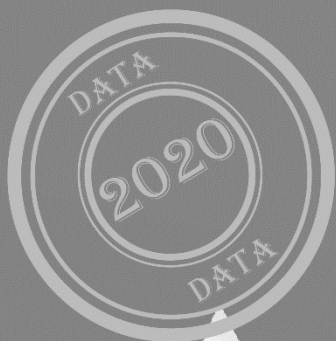


**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA CIMAHI**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA CIMAHI

2020



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA CIMAHI 2020

ISBN	:	-
No. Publikasi	:	32770.2107
Katalog	:	4102004.3277
Ukuran Buku	:	18.2 cm x 25.7 cm
Jumlah Halaman	:	xii + 98 Halaman
Naskah	:	BPS Kota Cimahi
Penyunting	:	BPS Kota Cimahi
Desain Kover oleh:	:	BPS Kota Cimahi
Penerbit	:	© BPS Kota Cimahi
Pencetak	:	BPS Kota Cimahi
Sumber Ilustrasi	:	Rusun Cibereum, Pasar Atas, Fly over Cimindi

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA CIMAHI 2020

Tim Penyusun

Pengarah	:	Ir. Sitti Sarah
Koordinator Teknis	:	Nuraeni Arumsari S.Si, M.T
Naskah	:	1. Bimo Nugroho, S.ST. 2. Nadhifa Fikriyah S.Tr.Stat. 3. Ir. Ati Rohayati MM 4. Irnanda Mas Putri SST
Pengolah Data	:	1. Windi Pramudyawardani, S.ST., M. Stat.
Gambar Kulit dan Infografis	:	
Penyunting	:	1. Nuraeni Arumsari S.Si, M.T 2. Rosidah, S.A.P.

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi 2020 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi yang menyajikan perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Cimahi tahun 2020. Publikasi ini berisi berbagai data yang bersumber dari data BPS yaitu hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2020, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan proyeksi Penduduk 2010-2025.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut 8 bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik bagi instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi berbagai pihak sehingga publikasi ini dapat terbit tepat waktu.

Cimahi, November 2021

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Cimahi



Ir. Sitti Sarah

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
Kependudukan.....	1
1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	3
1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk.....	7
1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan.....	8
1.4 Fertilitas.....	9
1.5 Wanita Menurut Usia Kawin Pertama.....	10
1.6 Penggunaan Alat/Cara KB.....	12
Kesehatan.....	15
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk.....	15
2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita.....	17
2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan.....	20
Pendidikan.....	25
3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis.....	25
3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.....	26
3.3 Tingkat Pendidikan.....	28
3.4 Partisipasi Sekolah (APM dan APK).....	29
Ketenagakerjaan.....	35
4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	36

4.2.	Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan.....	40
4.3.	Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan.....	44
4.4.	Sektor Formal dan Sektor Informal.....	48
	Taraf dan Pola Konsumsi	55
	Perumahan dan Lingkungan	63
6.1	Kualitas Rumah Tinggal.....	63
6.2	Fasilitas Rumah Tinggal.....	66
6.3	Status Kepemilikan Rumah Tinggal.....	68
	Kemiskinan.....	71
7.1	Perkembangan Penduduk Miskin	72
7.2	Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).....	73
7.3	Karakteristik Pendidikan	76
7.4	Karakteristik Ketenagakerjaan	77
7.5	Karakteristik Perumahan	79
	Sosial Lainnya	85
8.1	Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	85
8.2	Pelayanan Kesehatan Gratis	87
8.3	Kartu Perlindungan Sosial dan Kartu Keluarga Sejahtera.....	88

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Cimahi Tahun 2000-2020.....	5
Tabel 1.2	Sebaran Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2020.....	8
Tabel 2.1	Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, 2019 – 2020.....	17
Tabel 3.1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca Dan Menulis, 2020.....	26
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan, 2020	31
Tabel 4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi, 2019 – 2020.....	43
Tabel 4.2	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Kegiatan Formal dan Informal di Kota Cimahi, Agustus 2019 – 2020	49
Tabel 5.1	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kota Cimahi, 2020	57
Tabel 6.1	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Indikator Kualitas Perumahan, 2019 dan 20120	64
Tabel 6.2	Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, Tahun 2019 – 2020.....	66
Tabel 6.3	Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2019 - 2020	68
Tabel 8.1	Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi Tahun 2019 dan 2020	86

Tabel 8.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial Selama Setahun Terakhir 2020	88
-----------	---	----

<https://cimahikota.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Halaman

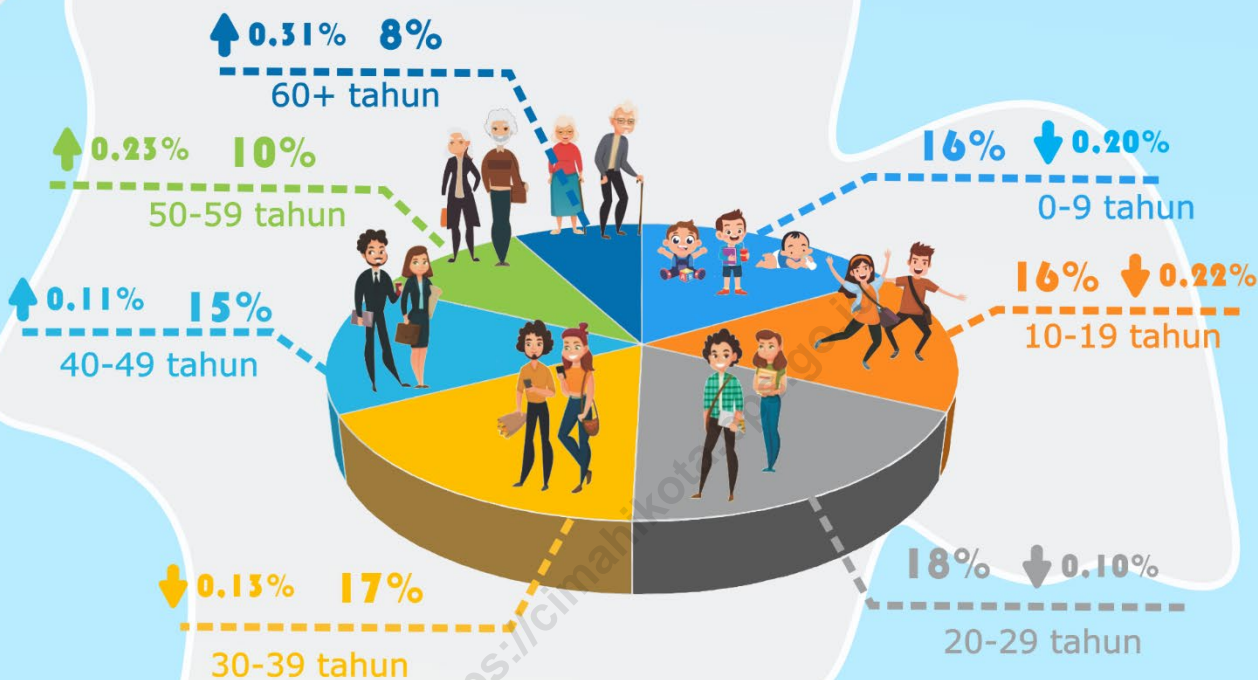
Grafik 1.1	Jumlah Penduduk di Kota Cimahi Menurut Proyeksi Penduduk Tahun 2016-2020	3
Grafik 1.2	Jumlah Penduduk di Kota Cimahi Menurut Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010-2020.....	4
Grafik 1.3	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi menurut Sensus Penduduk, 2000-2020.....	6
Grafik 1.4	Rasio Jenis Kelamin Kecamatan di Kota Cimahi, 2020.....	9
Grafik 1.5	Persentase Wanita yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Di Kota Cimahi, 2019-2020.....	11
Grafik 1.6	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin di Kota Cimahi dan Penggunaan Alat /Cara KB Sedang Digunakan, 2019-2020.....	12
Grafik 2.1	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Kota Cimahi (tahun), 2016-2020.....	16
Grafik 2.2	Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI Menurut Lama menyusui (Bulan) di Kota Cimahi, 2020.....	18
Grafik 2.3	Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi, di Kota Cimahi, 2020	19
Grafik 2.4	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2020	20
Grafik 2.5	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan di Kota Cimahi, 2020.....	21
Grafik 3.1	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Cimahi (tahun), 2016-2020	27
Grafik 3.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2020.....	29
Grafik 3.3	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah, 2019-2020	30

Grafik 4.1	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja di Kota Cimahi, Tahun 2019 – 2020.....	37
Grafik 4.2	Jumlah Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja di Kota Cimahi, Tahun 2019-2020	38
Grafik 4.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, Tahun 2019 – 2020.....	39
Grafik 4.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, 2019 – 2020.....	40
Grafik 4.5	Jumlah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi, 2019-2020	41
Grafik 4.6	Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi, 2020.....	44
Grafik 4.7	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan di Kota Cimahi, Agustus 2020.	45
Grafik 4.8	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Cimahi, 2019 – 2020.....	46
Grafik 4.9	Struktur Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja di Kota Cimahi, 2019 – 2020	48
Grafik 4.10	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Ijasah yang Dimiliki dan Status Kegiatan Informal di Kota Cimahi, Agustus 2019-2020	51
Grafik 5.1	Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kota Cimahi, 2019 – 2020.....	56
Grafik 5.2	Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Makanan di Kota Cimahi, 2020.....	58
Grafik 5.3	Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Non Makanan di Kota Cimahi, 2020	59
Grafik 5.4	Indeks Gini Menurut Kota Cimahi, 2016 – 2020.....	59
Grafik 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kota Cimahi, 2019 dan 2020	53
Grafik 7.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Cimahi, 2015 - 2020 (Ribuan Orang)	73

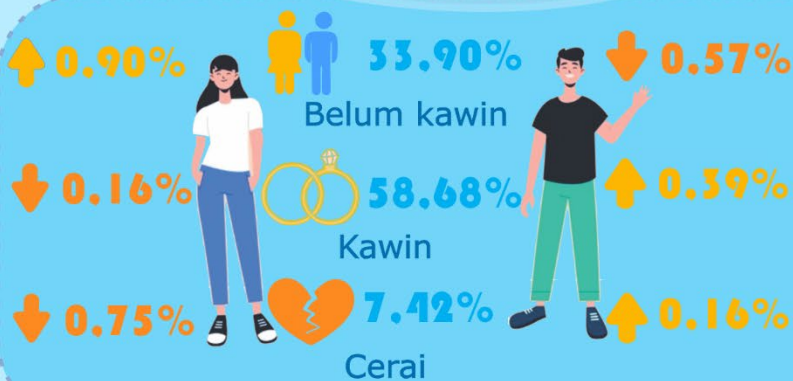
Grafik 7.2	Garis Kemiskinan Kota Cimahi, 2015 - 2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)	74
Grafik 7.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Cimahi 2015 - 2020	75
Grafik 7.4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kota Cimahi, 2015 – 2020	75
Grafik 7.5	Persentase Penduduk Miskin Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Cimahi, 2019 - 2010	77
Grafik 7.6	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kota Cimahi, 2019 – 2020	78
Grafik 7.7	Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja dan Bidang Pekerjaan di Kota Cimahi, 2019 – 2020	79
Grafik 7.8	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama Kota Cimahi , Tahun 2019 – 2020	81
Grafik 8.1	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Tahun 2020	89



Statistik Kependudukan Kota Cimahi Tahun 2020



Komposisi penduduk Kota Cimahi didominasi kelompok usia 20 hingga 39 tahun. Komposisi penduduk usia 0 hingga 39 tahun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sementara usia 40 keatas cenderung mengalami peningkatan



"Penduduk laki-laki mengalami peningkatan kawin dan cerai dibanding tahun sebelumnya sementara penduduk perempuan mengalami hal sebaliknya"

Kependudukan

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2006). Penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan, sekaligus juga yang menikmati hasil pembangunan namun juga bisa menjadi masalah yang bisa menghambat pembangunan suatu negara. Masalah kependudukan sangat mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan suatu daerah dan Negara.

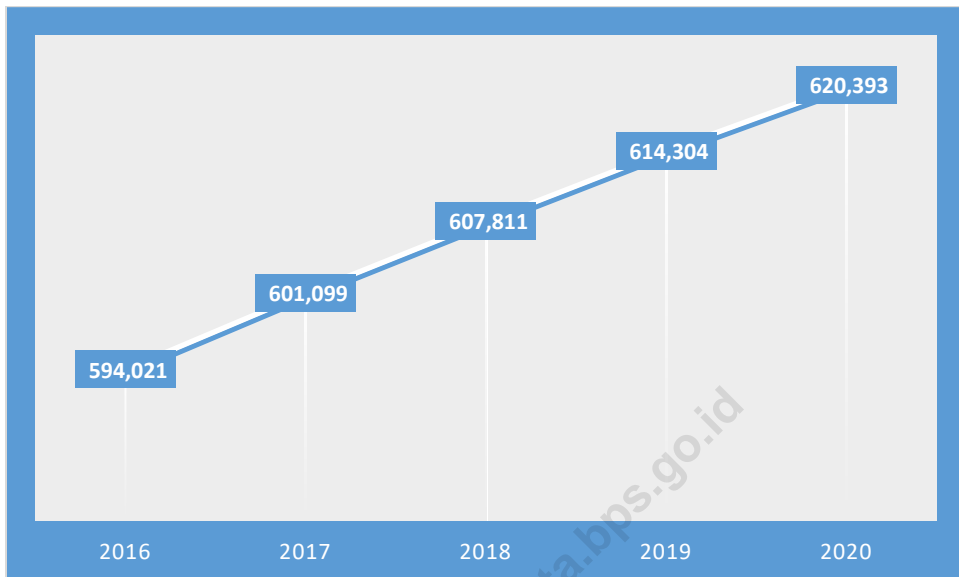
Masalah yang berkaitan dengan penduduk merupakan tugas besar dari semua pihak khususnya pemerintah untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dalam mengatasinya. Masalah kependudukan adalah salah satu masalah krusial yang mengakibatkan efek domino terhadap permasalahan lain yaitu lingkungan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam hal kependudukan, karena Jumlah Penduduk Indonesia merupakan penduduk terbesar di kawasan ASEAN dan merupakan urutan empat terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Berdasarkan proyeksi penduduk 2010-2020, jumlah penduduk Kota Cimahi mencapai 620.393 jiwa pada tahun 2020.

1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Cimahi yang banyak, akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat Kota Cimahi kedepannya. Dampak tersebut harus dicarikan solusi yang tepat untuk menanggulangnya. Jumlah penduduk Kota Cimahi tahun 2020 adalah 620.393 jiwa (proyeksi BPS). Dengan penduduk yang besar maka pemerintah tidak akan kesulitan dalam penyediaan tenaga kerja, namun di sisi lain jumlah penduduk yang besar ini memerlukan perhatian dari pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan penduduknya baik material maupun rohaniannya. Masalah-masalah lain akan timbul seperti kemiskinan, pengangguran dan lain-lain.

Grafik 1.1. Jumlah Penduduk di Kota Cimahi Menurut Proyeksi Penduduk Tahun 2016-2020

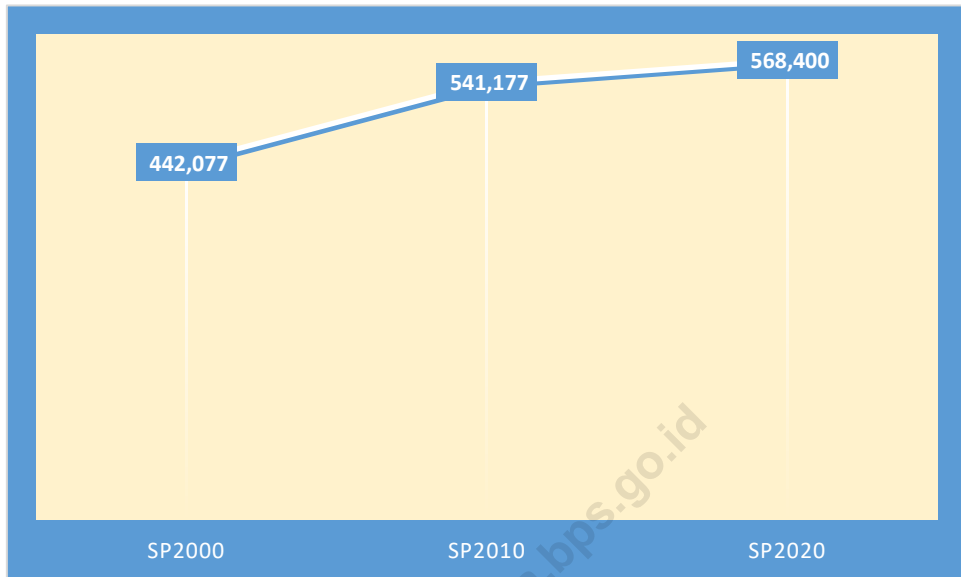


Sumber: Proyeksi Penduduk Kota Cimahi, 2010-2020

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Cimahi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2016, jumlah penduduk Kota Cimahi sebanyak 594.021 jiwa mengalami peningkatan sebesar 4,44 persen pada tahun 2020 atau dengan kata lain mengalami penambahan sebanyak 26.372 jiwa. Dari jumlah penduduk sebanyak 620.393 jiwa pada tahun 2020 tersebar di tiga kecamatan di Kota Cimahi.

Di tahun 2020 BPS juga menghitung jumlah penduduk dengan metode sensus pada kegiatan Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan pada bulan september 2020. Hasilnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.2. Jumlah Penduduk di Kota Cimahi Menurut Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010-2020

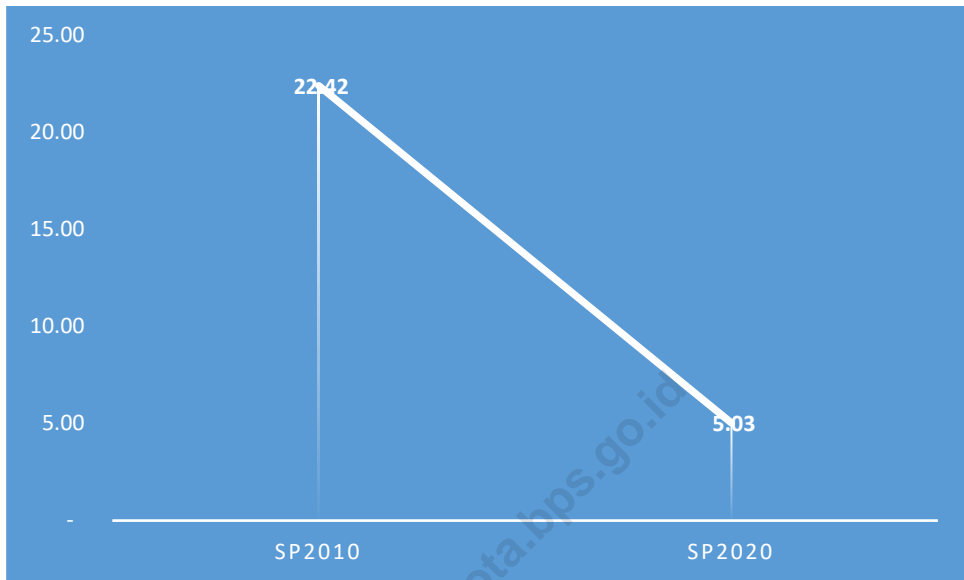


Sumber: Sensus Penduduk Kota Cimahi, 2010-2020

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kota Cimahi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan Sensus Penduduk 2000, dua puluh tahun yang lalu, jumlah penduduk Kota Cimahi sebanyak 442.077 jiwa mengalami peningkatan sebesar 28,57 persen pada tahun 2020 atau dengan kata lain mengalami penambahan sebanyak 126.323 jiwa.

Dilihat dari grafik laju pertumbuhan penduduk tahun 2000 hingga tahun 2020, laju pertumbuhan penduduknya terus mengalami perlambatan. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 5,03 persen atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 22,42 persen mengalami penurunan sebesar 17,39 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengendalian pertumbuhan penduduk Kota Cimahi dari tahun ke tahunnya.

Grafik 1.3. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi menurut Sensus Penduduk, 2000-2020



Sumber: Sensus Penduduk Kota Cimahi, 2010-2020

Laju pertumbuhan penduduk di kecamatan di Kota Cimahi pada tahun 2020 secara umum juga mengalami perlambatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dari 3 kecamatan yang ada di Kota Cimahi terdapat 1 kecamatan yang laju pertumbuhannya menurun (nilai minus) penduduk Kota Cimahi yaitu Kecamatan Cimahi Tengah. Sedangkan 2 kecamatan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang melambat, yaitu Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Utara.

**Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kota Cimahi Tahun 2000-2020**

Kecamatan	2000	2010	2020
Cimahi Selatan	NA	19.27	4.50
Cimahi Tengah	NA	14.19	-0.80
Cimahi Utara	NA	39.24	12.32
Kota Cimahi	NA	22.42	5.03

Sumber: Sensus Penduduk Kota Cimahi, 2010-2020

1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Pada publikasi indikator kesejahteraan rakyat 2020 pada tahun ini, angka jumlah penduduk menurut kecamatan yang akan disajikan merupakan angka dari hasil sensus penduduk 2020. Persoalan lain terkait dengan jumlah penduduk adalah sebaran penduduk, kepadatan penduduk dan distribusi penduduk yang tidak merata. Apabila kita lihat sebaran penduduk per-kecamatan di Kota Cimahi, terlihat bahwa penduduk Kota Cimahi terpusat di 1 kecamatan yaitu kecamatan Cimahi Selatan. Sebaran penduduk yang tidak merata akan menimbulkan banyaknya permasalahan kependudukan, seperti kemacetan, pengangguran, kebutuhan pemukiman dan masalah-masalah lain.

Jika dilihat dari kepadatan penduduk di Kecamatan di Kota Cimahi, terlihat di wilayah satu kecamatan lebih padat dibanding kecamatan lainnya, yaitu kecamatan Cimahi Tengah. Dari Tabel 1.2 terlihat masing-masing kecamatan dengan kepadatan penduduk. Kecamatan Cimahi Selatan dengan jumlah penduduk 240.990 Jiwa dengan kepadatan penduduk 14.226 jiwa per km², Kecamatan Cimahi Tengah dengan jumlah penduduk 161.758 orang dan kepadatan penduduk 16.000 jiwa per km² sehingga menjadi kecamatan terpadat,

sementara kecamatan Cimahi Utara dengan jumlah penduduk 165.652 orang mempunyai tingkat kepadatan terendah yaitu 12.436 jiwa per km².

Tabel 1.2. Sebaran Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2020

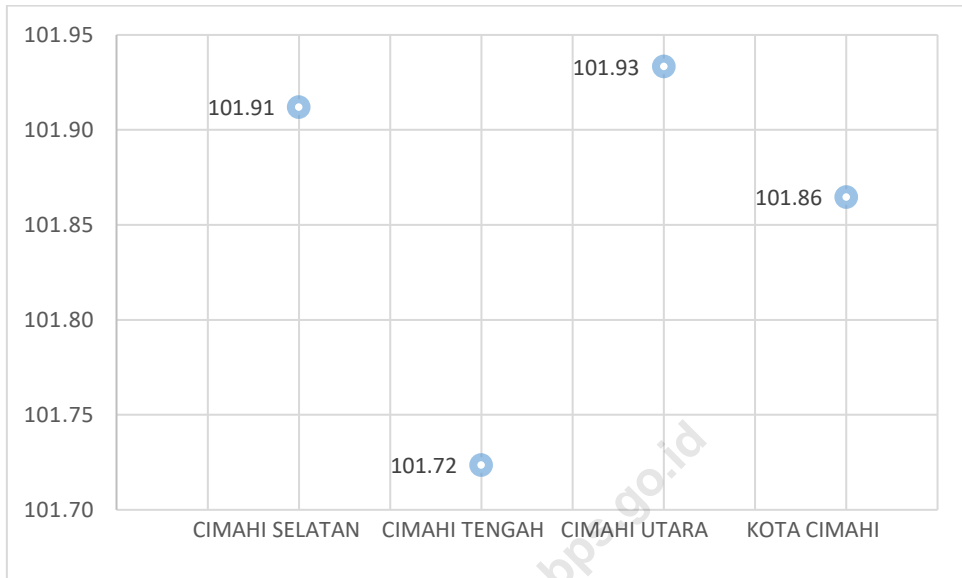
Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
Cimahi Selatan	240.990	42,40	14.226
Cimahi Tengah	161.758	28,46	16.000
Cimahi Utara	165.652	29,14	12.436
Kota Cimahi	568.400	100,00	14.080

Sumber : Sensus Penduduk Kota Cimahi, 2010-2020

1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) dan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang sangat penting. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah, sedangkan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) menunjukkan berapa tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Grafik 1.4. Rasio Jenis Kelamin Kecamatan di Kota Cimahi, 2020



Sumber: Sensus Penduduk Kota Cimahi, 2010-2020

Komposisi penduduk Kota Cimahi jika dilihat dari rasio jenis kelamin, pada tahun 2020 sebesar 101,86. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 101 penduduk laki-laki, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Apabila kita lihat rasio jenis kelamin perkecamatan di Kota Cimahi, maka dari semua Kecamatan memiliki rasio jenis kelamin dengan nilai disekitar 101. Rasio jenis kelamin tertinggi terletak pada Kecamatan Cimahi Utara, sedangkan yang terendah di Kecamatan Cimahi Tengah.

1.4 Fertilitas

Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah. Angka fertilitas yang tinggi bisa menyebabkan penambahan penduduk di suatu wilayah, ledakan jumlah penduduk akan terjadi apabila angka fertilitas tinggi tetapi angka mortalitas atau kematian rendah.

Menurut Ida Bagus Mantra (1985), terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi fertilitas yang dibedakan atas faktor-faktor demografi dan faktor-faktor non demografi. Faktor-faktor demografi antara lain struktur atau komposisi umur, status

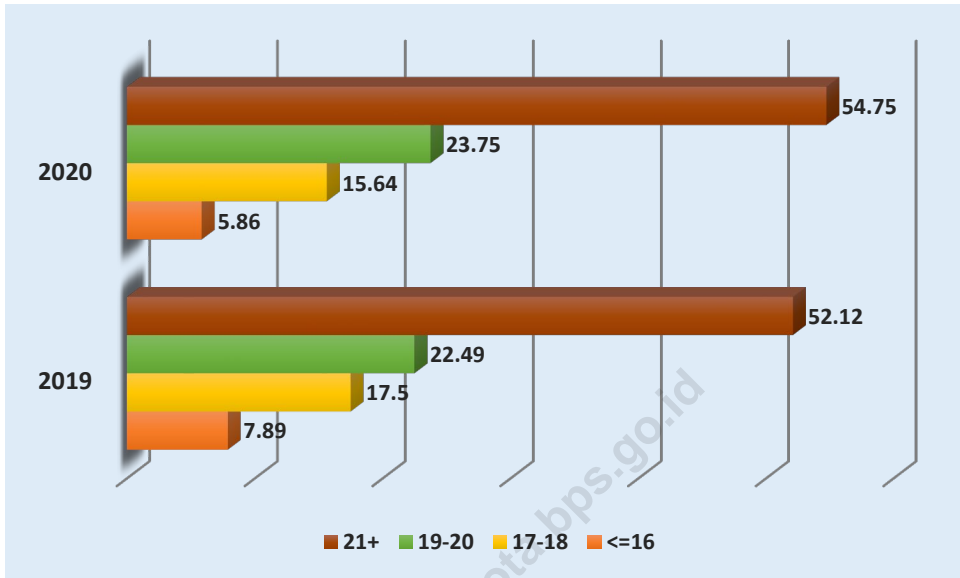
perkawinan, umur kawin pertama, keperidian atau fekunditas, dan proporsi penduduk yang kawin. Faktor-faktor non demografi antaranya keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status wanita, urbanisasi dan industrialisasi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fertilitas.

1.5 Wanita Menurut Usia Kawin Pertama

Usia Kawin Pertama bisa dijadikan salah satu pemicu penambahan jumlah penduduk, semakin panjang masa reproduksi seorang wanita semakin banyak kemungkinan anak yang bisa dilahirkan. Menurut UU Perkawinan 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali (pasal 6 ayat 2).

Sedangkan menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi remaja saat ini idealnya 21 hingga 25 tahun. Pada usia itu, remaja sudah tumbuh pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan kesehatan reproduksi. Hal itu berpengaruh terhadap kesehatan pasangan maupun anak dari pasangan muda itu, jadi dimasa mendatang usia remaja menikah pertama pada usia dewasa. Dengan tumbuhnya usia nikah semakin dewasa dapat menunjang keberhasilan program KB dengan menurunnya angka anak dilahirkan seorang ibu atau Angka kelahiran Total (TFR).

Grafik 1.5. Persentase Wanita yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kota Cimahi, 2019 - 2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2019-2020

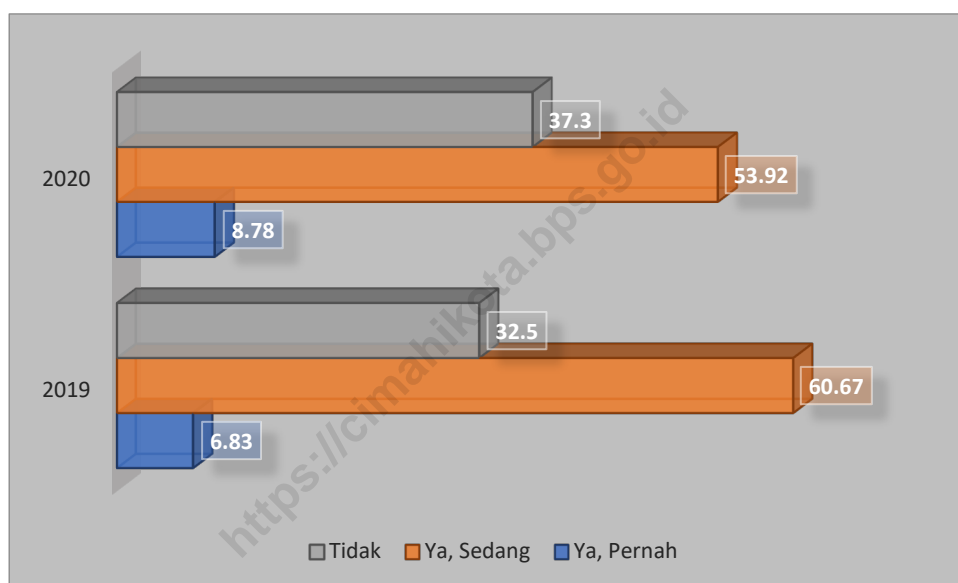
Berdasarkan Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2019 - 2020, sebagian besar wanita di Kota Cimahi melakukan perkawinan pertamanya pada usia lebih dari 21 tahun yaitu sebesar 54,75 persen, pada tahun sebelumnya yang paling banyak wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia lebih dari 21 tahun yaitu sebesar 52,12 persen.

Yang perlu kita telaah lebih lanjut yaitu wanita yang melakukan perkawinan pertama di usia kurang dari 16 tahun. Persentase wanita Kota Cimahi berusia kurang dari 16 tahun yang melakukan perkawinan pertamanya sebesar 5,86 persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,89 persen. Padahal pada usia 10-16 tahun tersebut seseorang masih dapat dikatakan sebagai anak-anak yang belum siap untuk membina sebuah keluarga.

1.6 Penggunaan Alat/Cara KB

Pemerintah saat ini sudah menggalakkan kembali program KB (Keluarga Berencana). Program ini tidak hanya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui kelahiran, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta mewujudkan bonus demografi yang berkualitas.

Grafik 1.6. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin di Kota Cimahi dan Penggunaan Alat /Cara KB Sedang Digunakan, 2019-2020



Sumber: Susenas Maret, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2019-2020

Berdasarkan publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2019 - 2020, di Kota Cimahi, penggunaan alat KB oleh wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin digunakan oleh 53,92 persen. Sementara yang tidak pernah menggunakan 37,3 persen dan yang pernah menggunakan 8,78 persen. Sedangkan pada tahun sebelumnya persentase wanita yang menggunakan alat KB lebih banyak yaitu 60,67 persen.

PROFIL KESEHATAN KOTA CIMAHI TAHUN 2020

37,30%

Perempuan pernah kawin tidak pernah menggunakan KB

11,72%

Penduduk pernah mengalami sakit

47,75%

Penduduk menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan



8,61%

Bayi dilahirkan dalam keadaan stunting

3,25%

Baduta tidak pernah diberi ASI



39,04%

Balita belum mendapat imunisasi lengkap

9,97

Rata-rata lama pemberian ASI (bulan)

45,76%

Balita belum memiliki kartu imunisasi



67,51

Rata-rata batang rokok yang dihisap per minggu

30,61%

Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan perokok

Kesehatan

Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat, pemerintah dan swasta bersama-sama. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah sudah melakukan berbagai program-program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti dengan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti melalui BPJS, puskesmas-puskesmas, meningkatkan fasilitas tenaga kesehatan, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, meningkatkan tingkat Imunitas dan gizi balita dan sebagainya.

Berhasil tidaknya program-program pemerintah dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan berbagai indikator kesehatan seperti Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Angka Kesakitan, prevalensi Balita Kurang Gizi dan indikator-indikator yang lain yang berkaitan dengan tenaga medis dan fasilitas kesehatan.

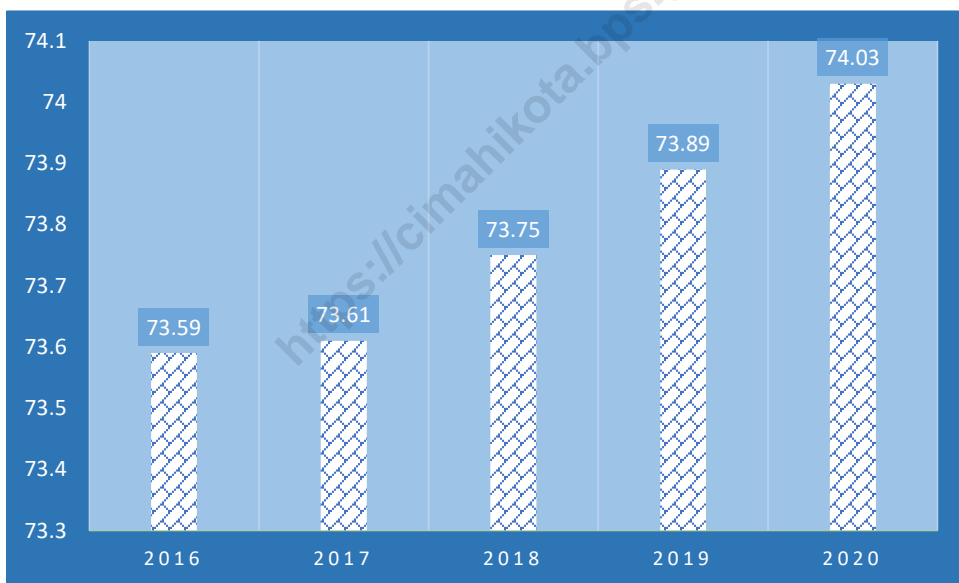
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita di suatu wilayah merupakan salah satu rujukan melihat tingkat kesehatan di wilayah tersebut.

Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam menurunkan Angka kematian Bayi dan Balita, tidak hanya terfokus pada kewajiban pemerintah saja, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan sangatlah penting, khususnya pengetahuan ibu dalam merawat bayi dan balitanya.

Dimensi kesehatan tidak hanya mencakup Angka Kematian Bayi dan Balita, tetapi juga bisa dilihat dari Angka Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selama periode 2016 hingga 2020, Kota Cimahi telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,44 tahun. Pada tahun 2016, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kota Cimahi hanya sebesar 73,59 tahun, dan pada tahun 2020 telah mencapai 74,03 tahun. Semakin meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Cimahi mengalami usia yang lebih panjang dari tahun ke tahun.

Grafik 2.1 Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Kota Cimahi (tahun), 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, 2021

Peningkatan angka harapan hidup sangat dipengaruhi banyak faktor, seperti semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Persentase penduduk Kota Cimahi yang menderita sakit pada tahun 2020 sebesar 11,72 persen. Persentase ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai 16,45 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin persentase penduduk yang sakit maka penduduk laki-laki lebih kecil dibanding penduduk perempuan. Penduduk laki-laki yang menderita sakit sebesar 11,19 persen dan penduduk perempuan sebesar 12,26 persen.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, 2019-2020

Tahun	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
2019	14,57	85,43	18,35	81,65	16,45	83,55
2020	11,19	88,81	12,26	87,74	11,72	88,28

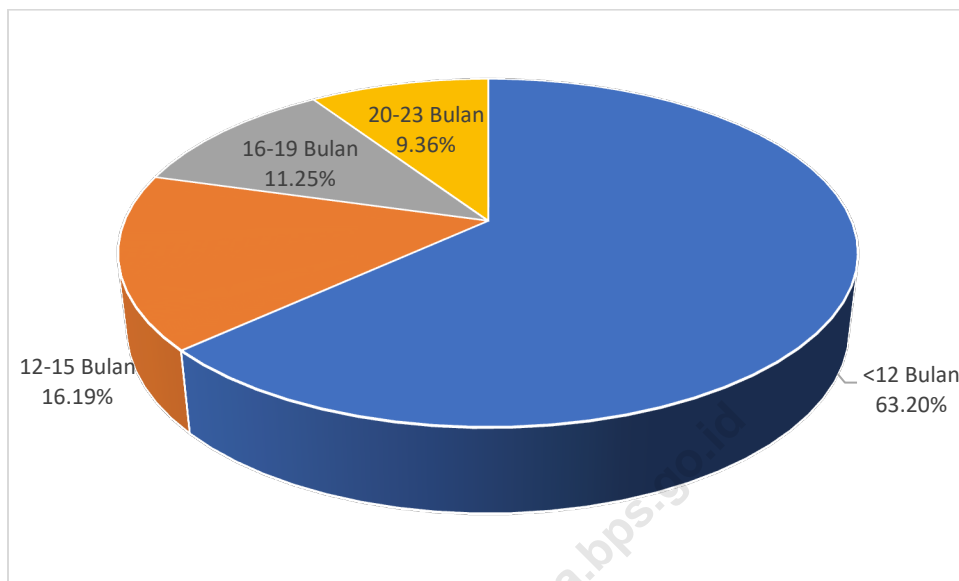
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020

2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena ASI mengandung zat gizi dengan komposisi sesuai dengan kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang bayi secara optimal (WHO 2001; Prasetyono, 2009). Selain itu peningkatan program ASI eksklusif merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Air Susu ibu sangat dianjurkan untuk diberikan kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang sangat dibutuhkan bayi untuk jangka panjang dalam proses tumbuh kembang. ASI memiliki nutrisi terbaik dan zat-zat berkualitas tinggi yang bisa memberikan antibodi dan tingkat kecerdasan untuk bayi.

Grafik 2.2 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI Menurut Lama menyusui (Bulan) di Kota Cimahi, 2020



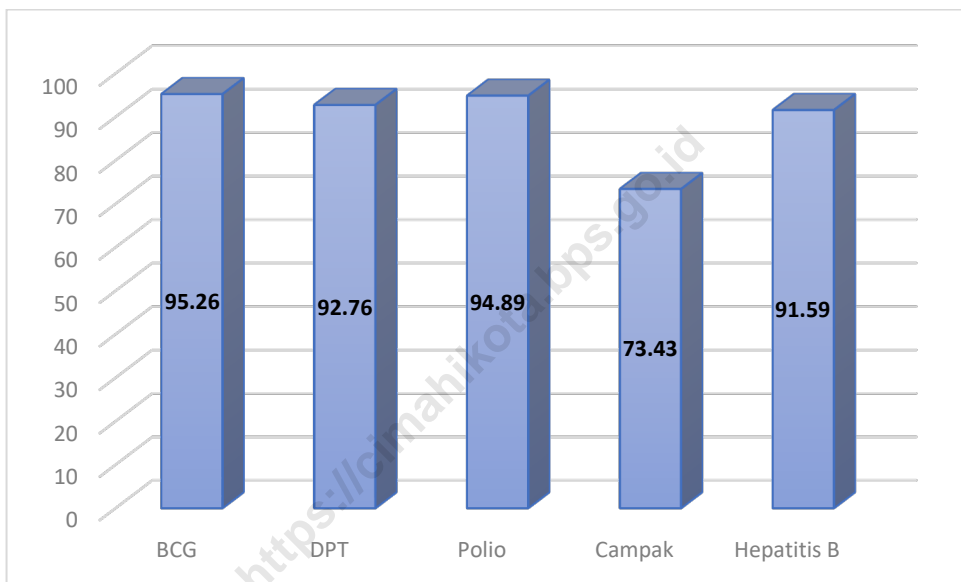
Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020*

Sangat dianjurkan seorang ibu dapat menyusui selama 2 tahun, karena semakin lama bayi mendapatkan ASI akan memberikan kekebalan yang lebih kuat pada bayi. Di Kota Cimahi pada tahun 2020, rata-rata lama bayi diberi ASI selama 9,54 bulan. Persentase paling besar yaitu anak yang disusui sampe 12 bulan atau 1 tahun, yaitu sebesar 63,21 persen, kemudian yang disusui selama 12 hingga 15 bulan sebesar 16,19 persen, sedangkan yang disusui selama 16-19 bulan dan 20-23 bulan masing-masing sebesar 11,25 persen dan 9,36 persen.

Selain ASI hal yang sangat diperlukan bagi kesehatan anak dan tingkat kekebalan tubuh anak adalah pemberian imunisasi. Imunisasi merupakan pemberian sistem kekebalan tubuh anak agar kuat terhadap suatu penyakit, jenis imunisasi ada dua macam yaitu kekebalan tubuh yang sudah ada pada diri anak yang merupakan bawaan sejak lahir dan kekebalan yang diberikan kepada anak seperti pemberian vaksin bisa melalui suntik ataupun tetes. Di Indonesia imunisasi

ada yang wajib dan juga ada yang dianjurkan, imunisasi wajib seperti BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B, sedangkan beberapa imunisasi yang dianjurkan seperti Typus, influenza, MMR dan masih banyak lagi.

Grafik 2.3 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi, di Kota Cimahi, 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020

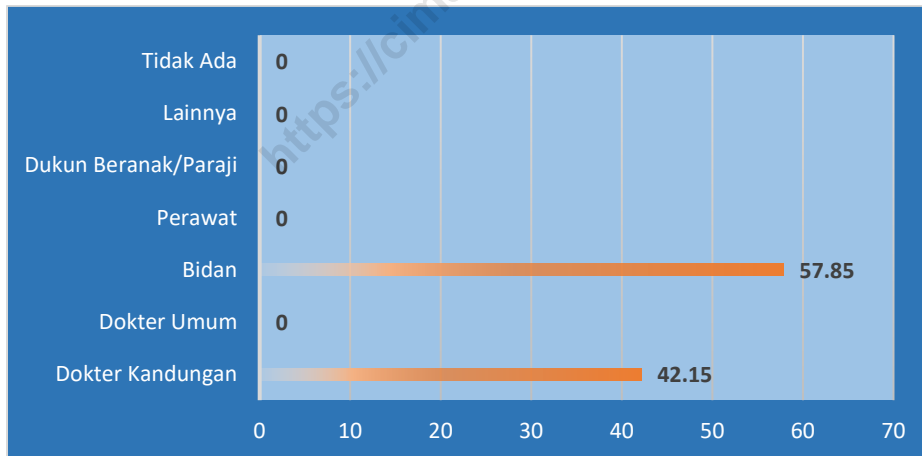
Berdasarkan publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2020, hampir semua balita yang ada di Kota Cimahi pernah mendapatkan imunisasi wajib, hal ini terlihat dari Grafik 2.3, bahwa lebih dari 70 persen balita mendapat imunisasi wajib seperti BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B. Persentase terbesar adalah imunisasi BCG sebesar 95,26 persen. Sedangkan persentase terkecil adalah imunisasi campak sebesar 73,43 persen.

2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi fasilitas dan tenaga kesehatan sangatlah penting. Tenaga medis yang handal dan fasilitas kesehatan yang lengkap sangat penting karena bisa mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi. Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya melalui berbagai program kesehatan salah satunya melalui perbaikan fasilitas kesehatan seperti yang tercantum pada Perpres No 5 tahun 2010.

Secara umum di Kota Cimahi persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin jika dilihat dari penolong proses kelahirannya, paling banyak ditolong oleh bidan, yaitu sebesar 57,85 persen. Sementara itu proses kelahirannya dibantu oleh dokter kandungan sebesar 42,15 persen.

Grafik 2.4 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2020



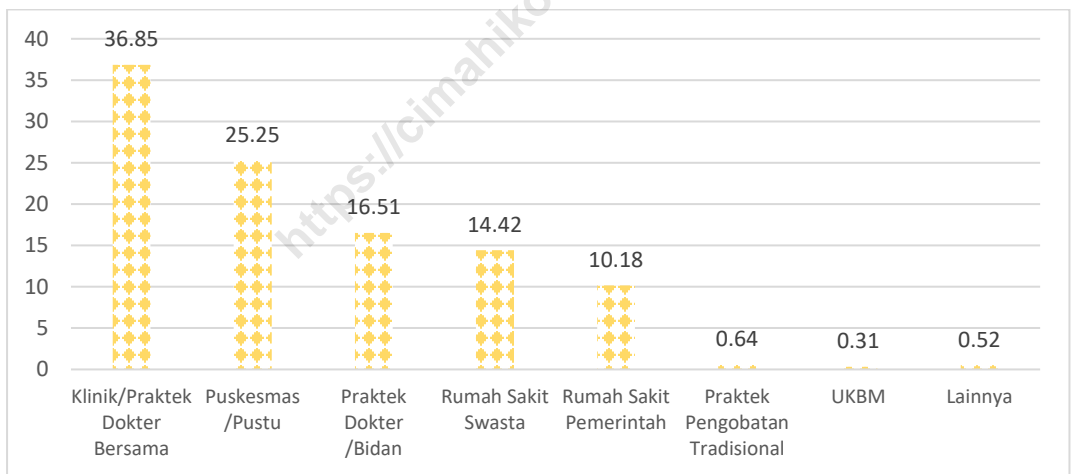
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020

Hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan tidak hanya penolong persalinan, tetapi juga fasilitas tempat berobat. Pemanfaatan fasilitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat

tinggal. Jarak rumah ke tempat berobat sangat mempengaruhi dalam menentukan pilihan dimana mereka akan berobat.

Menurut publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2020 yang diperoleh, ada beberapa tempat berobat yang jadi pilihan masyarakat untuk berobat jalan selama sebulan terakhir, seperti rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, praktek dokter/bidan, klinik, Puskesmas, UKBM (yang terdiri dari Pokesdes, Polindes, Posyandu, dan Balai Pengobatan), praktek pengobatan tradisional dan lainnya. Dari beberapa tempat berobat, di Kota Cimahi persentase terbesar penduduk berobat di Klinik/Praktek Dokter Bersama yaitu sebesar 36.85 persen, kemudian diikuti oleh Puskesmas/Pustu sebesar 25.25 persen.

Grafik 2.5 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan di Kota Cimahi, 2020

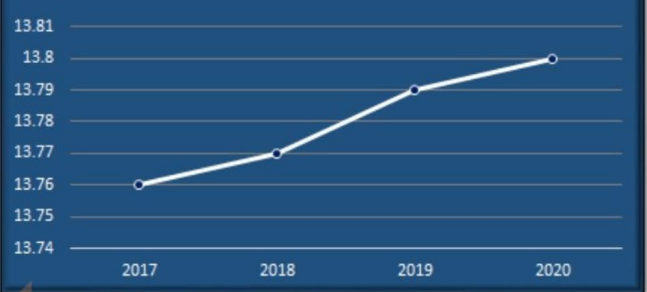


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020

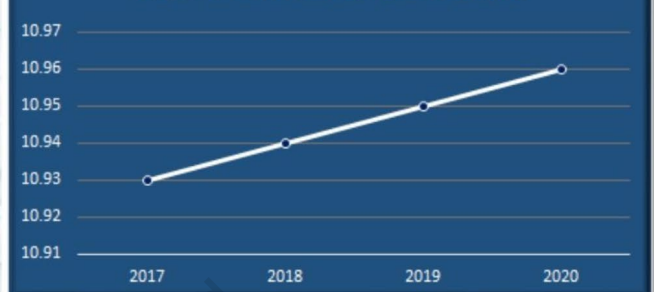


PENDIDIKAN KOTA CIMAH

HARAPAN LAMA SEKOLAH



RATA-RATA LAMA SEKOLAH

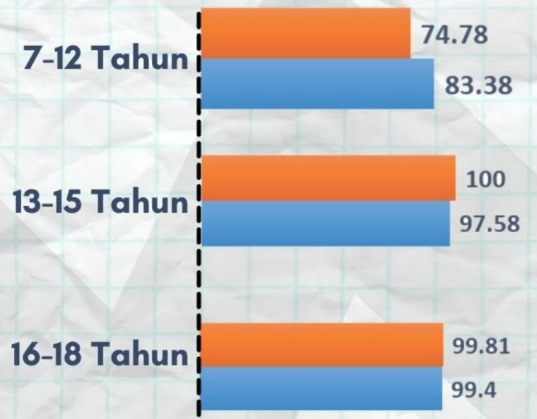


Secara umum, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah terus mengalami peningkatan, hal ini menjadikan pertanda baik dalam pembangunan kualitas manusia Kota Cimahi menuju arah yang lebih baik.

APM

APK

APS



" Secara umum, APK dan PM di Kota Cimahi menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan sedangkan APS penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada perempuan di dua kelompok umur "



Pendidikan

Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam UU. No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk survive dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah.

3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan membaca dan menulis sangat penting karena dapat mencerdaskan intelektual, spiritual, emosional, dan kepercayaan. Membaca akan membuka peluang untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dan memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan membaca dan menulis juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan kreatif, kritis, analitis dan imajinatif sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

Secara umum kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Cimahi sudah cukup bagus. Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf latin pada tahun 2020 persentasenya sangat besar yaitu 99,53 persen.

Apabila kita lihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis sedikit lebih besar dari pada perempuan dalam huruf latin. Penduduk laki-laki yang bisa membaca dan menulis huruf latin sebesar 99,57 persen dan perempuan sebesar 99,49 persen. Persentase penduduk laki-laki maupun perempuan di Kota Cimahi yang bisa membaca dan menulis huruf arab juga sangat besar yaitu sebesar 78,74 persen laki-laki dan sebesar 81,41 persen perempuan.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca Dan Menulis, 2020

Jenis Kelamin	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Buta Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	99,49	81,41	2,99	0,51
Perempuan	99,53	80,07	2,87	0,47
Total	99,57	78,74	2,75	0,43

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020

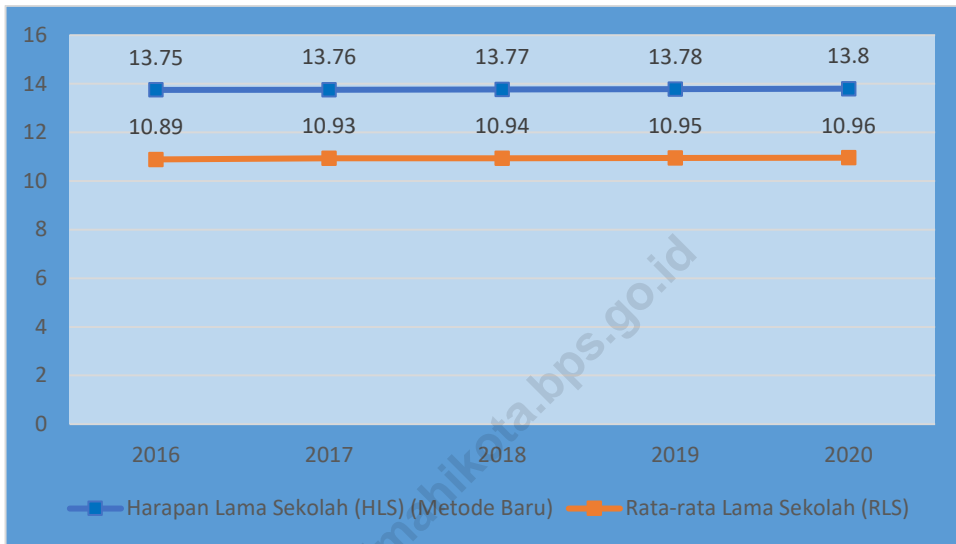
Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2020, penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Cimahi yang buta huruf terdapat 0,47 persen.

3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama

Sekolah di Kota Cimahi telah meningkat sebesar 0,05 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,07 tahun.

Grafik 3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Cimahi (tahun), 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, 2020

Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah terus meningkat tiap tahunnya. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dapat diartikan bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi telah mencapai 13,80 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1 atau D2.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk di suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Cimahi terus bertambah selama periode 2016 hingga 2020. Pertumbuhan yang positif ini

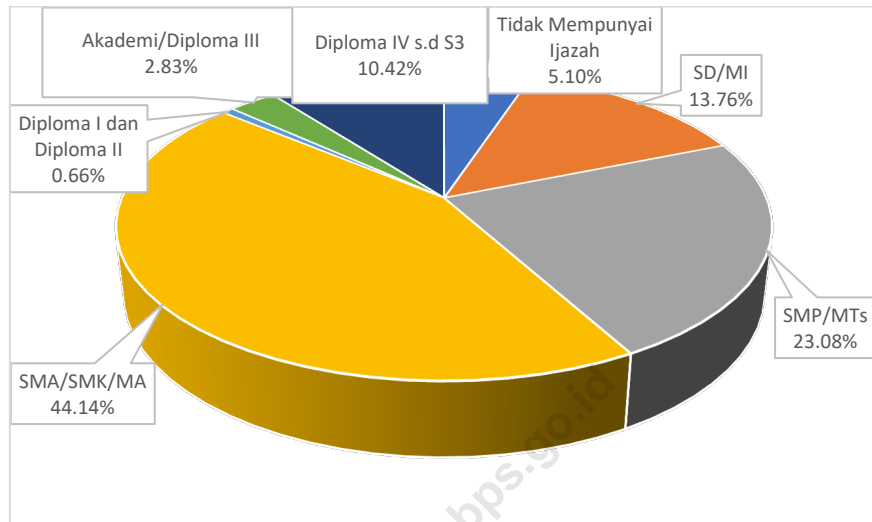
merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Cimahi yang lebih baik. Hingga tahun 2020, secara rata-rata penduduk Kota Cimahi usia 15 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga bangku SMA.

3.3 Tingkat Pendidikan

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kemampuan, keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang tergambar melalui tingkat pendidikan.

Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat tahun 2020, penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Cimahi persentase paling besar yang memiliki ijazah tertinggi adalah ijazah SMA/SMK/MA atau bisa dikatakan tamat SMA/SMK/MA sebesar 44,14 persen, kemudian SMP/MTs sebesar 23,08 persen dan SD/MI sebesar 13,76 persen. Hal ini berarti, program pemerintah di bidang pendidikan harus terus digalakkan demi tercapainya program wajib belajar 9 tahun.

Grafik 3.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020

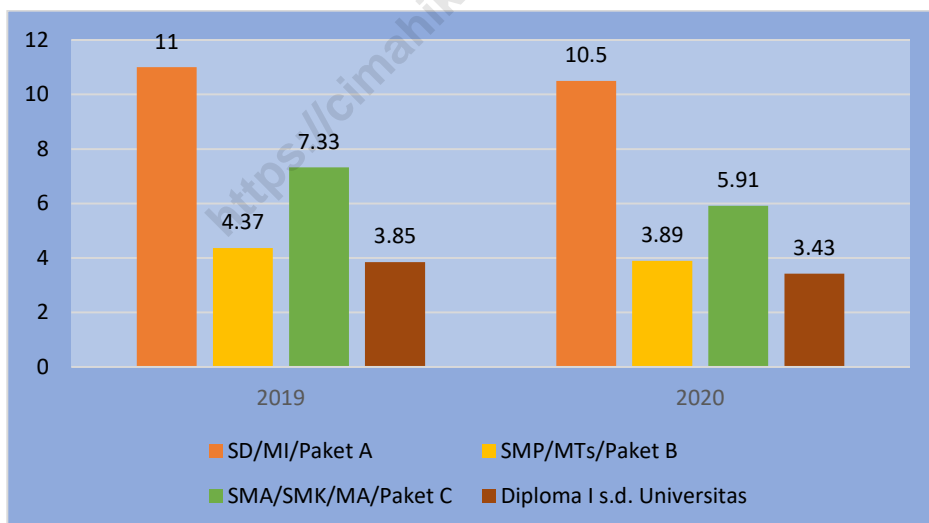
3.4 Partisipasi Sekolah (APM dan APK)

Peningkatan mutu pendidikan masih terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dilihat dari beberapa indikator antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Untuk penduduk berumur lima tahun ke atas yang masih bersekolah pada dua tahun terakhir di Kota Cimahi, persentase terbesar juga pada tingkat setara SD yaitu sebesar 11,00 persen pada tahun 2019 dan 10,50 persen pada tahun 2020. Sedangkan yang masih bersekolah di tingkat Diploma I / Universitas persentasenya paling kecil yaitu sebesar 3,85 persen pada tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 3,43 persen pada tahun 2020. Semua jenjang Pendidikan mengalami penurunan pada persentase penduduk 5 tahun ke atas yang masih sekolah pada tahun 2020. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut, mengenai penyebab utama terjadinya penurunan persentase ini. Terlebih, pada tahun 2020 sistem pendidikan di Indonesia terpaksa berubah menjadi sistem daring karena adanya pandemi Covid-19.

Grafik 3.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas yang Masih Sekolah, 2019-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020

Ditinjau dari Angka Partisipasi Sekolah (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang digunakan untuk melihat partisipasi sekolah menurut jenjang pendidikan tertentu, baik di jenjang SD, SMP maupun SMA. Secara umum di Kota Cimahi APM SD/MI sederajat lebih tinggi jika dibandingkan dengan APM

SMP dan SMA. Hal ini menggambarkan bahwa hampir semua penduduk mengenyam pendidikan SD.

**Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan, 2020**

Jenjang Pendidikan	APM	APK
(1)	(2)	(3)
SD/MI Sederajat	97,01	104,28
SMP/MTs Sederajat	80,82	91,14
SMA/SMK/MA Sederajat	71,91	101,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020

POTRET KETENAGAKERJAAN KOTA CIMAHI

• KOMPOSISI TENAGA KERJA

Jumlah Penduduk Usia Kerja
467,742 orang

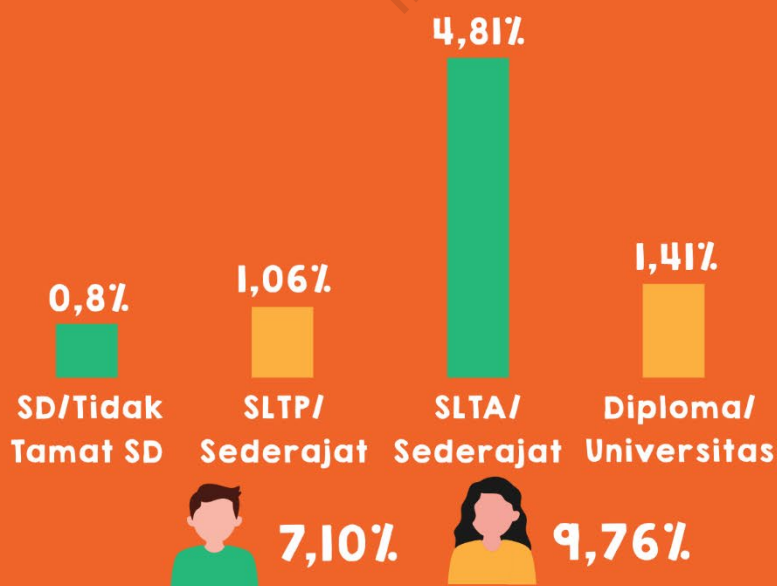
Jumlah Angkatan Kerja
296,513 orang



272,553 orang
Penduduk yang Bekerja

64,49 persen
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja

• TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terdapat pada lulusan SLTA/Sederajat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki



Ketenagakerjaan

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2019 dan 2020 kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/ gaji/pendapatan bersih.

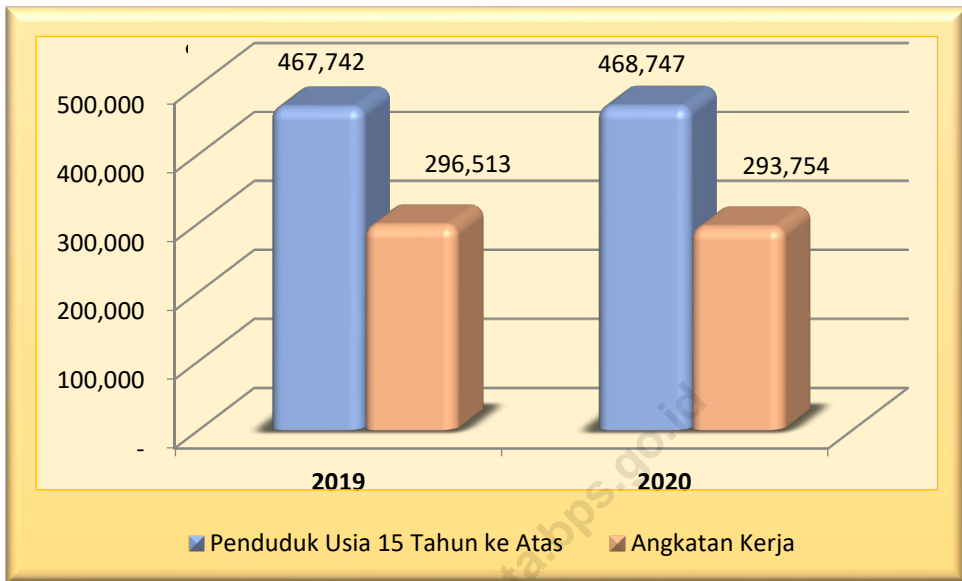
4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kota Cimahi 2020 sebanyak 468.747 orang, bertambah sebanyak 1.005 orang dibandingkan 2019 yang mencapai 467.742 orang. Adapun jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) pada 2020 mencapai 293.754 orang, berkurang sebanyak 2.759 orang dibanding 2019 yang mencapai 296.513 orang.

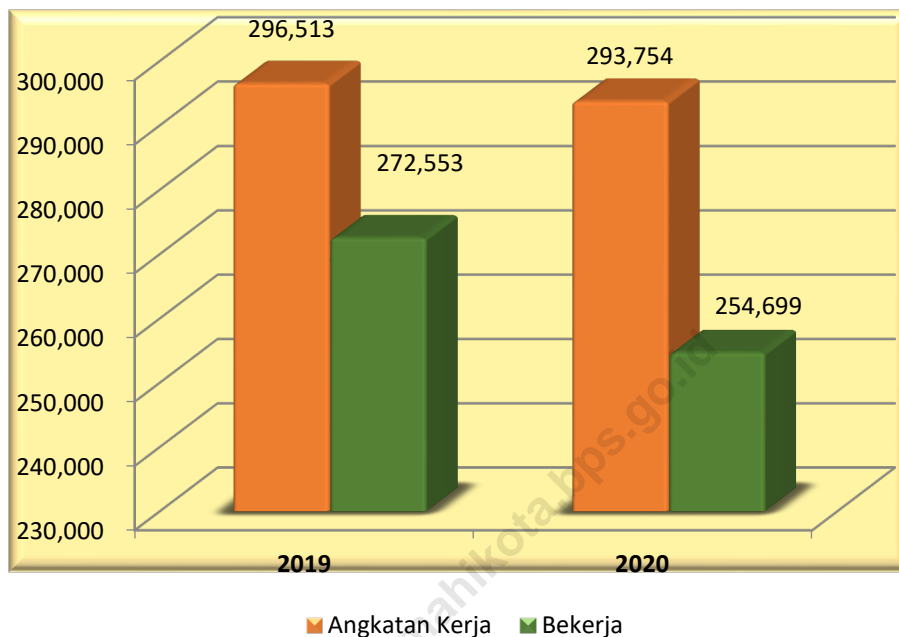
Grafik 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja di Kota Cimahi, Tahun 2019 – 2020



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2019 dan 2020

Dari total angkatan kerja sebanyak 293.754 orang pada Tahun 2020, sebanyak 86,70 persen atau sebanyak 254.669 orang melakukan aktivitas bekerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

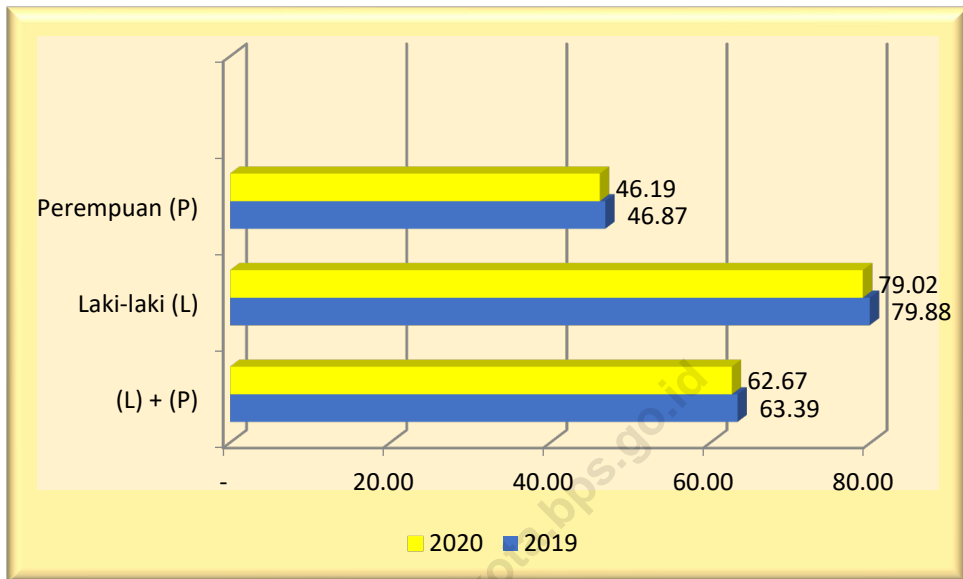
**Grafik 4.2 Jumlah Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja di Kota Cimahi,
Tahun 2019-2020**



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2019 dan 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Cimahi tahun 2020 bergerak turun dibanding tahun 2019. TPAK Kota Cimahi tahun 2019 sebesar 63,39 persen, sedangkan tahun 2020 sebesar 62,67 persen. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa baik tahun 2020 maupun tahun 2019 TPAK laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2020 TPAK laki-laki di Kota Cimahi mencapai 79,02 persen sedangkan TPAK perempuan 46,19 persen.

Grafik 4.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, Tahun 2019 – 2020



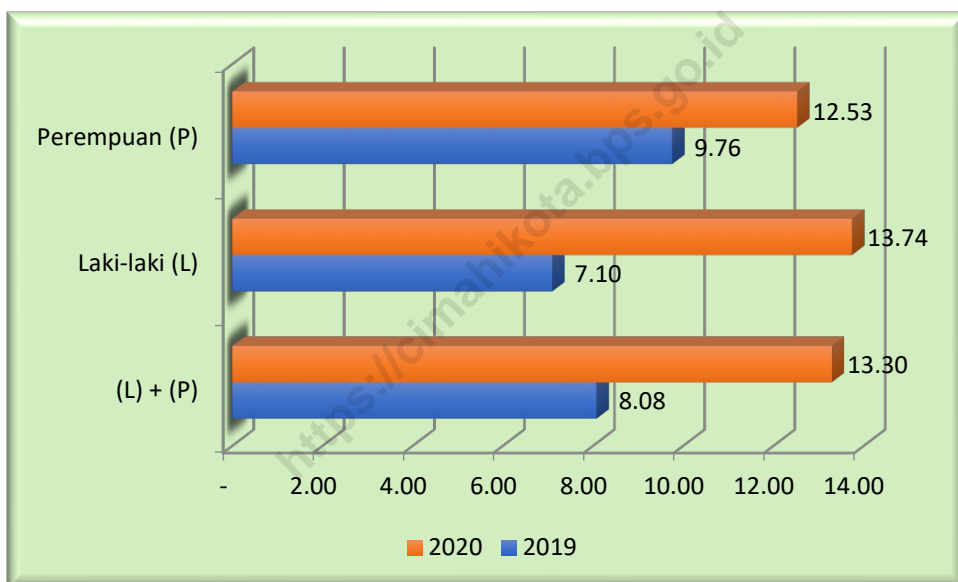
Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2019 dan 2020

TPAK Kota Cimahi Tahun 2020 menurun dari TPAK Tahun 2019, hal tersebut terlihat pula pada jumlah pengangguran yang mengalami perubahan. Jumlah penduduk yang menganggur, baik yang pernah bekerja maupun yang tidak pernah bekerja pada tahun 2019 sebanyak 23.960 orang. Pada tahun 2020 meningkat sebesar 63,0 persen atau bertambah sebanyak 15.095 orang menjadi 39.055 orang. Nilai Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kota Cimahi tahun 2019 mencapai 8,08 persen yang kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 13,30 persen. Kondisi ini dapat dipahami, pada tahun 2020 Pandemi Covid-19 mulai terjadi, berdampak pada perekonomian yang mengalami kontraksi. Hal tersebut berdampak pada pengurangan pekerja di beberapa bidang kegiatan usaha.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penganggur laki-laki tahun 2019 di Kota Cimahi sebanyak 13.278 orang, yang kemudian bertambah 12.267 orang menjadi 25.545 orang pada tahun 2020. Sedangkan jumlah penganggur

perempuan tahun 2019 sebanyak 10.682 orang dan tahun 2020 meningkat menjadi 13.510 orang. Pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan lebih tinggi dari TPT laki-laki yaitu TPT Perempuan sebesar 9,76 persen dan TPT Laki-laki 7,10 persen. Namun, pada tahun 2020 TPT laki-laki lebih tinggi dari TPT perempuan yaitu TPT Laki-laki sebesar 13,74 persen dan TPT Perempuan sebesar 12,53 persen.

Grafik 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, Tahun 2019 – 2020



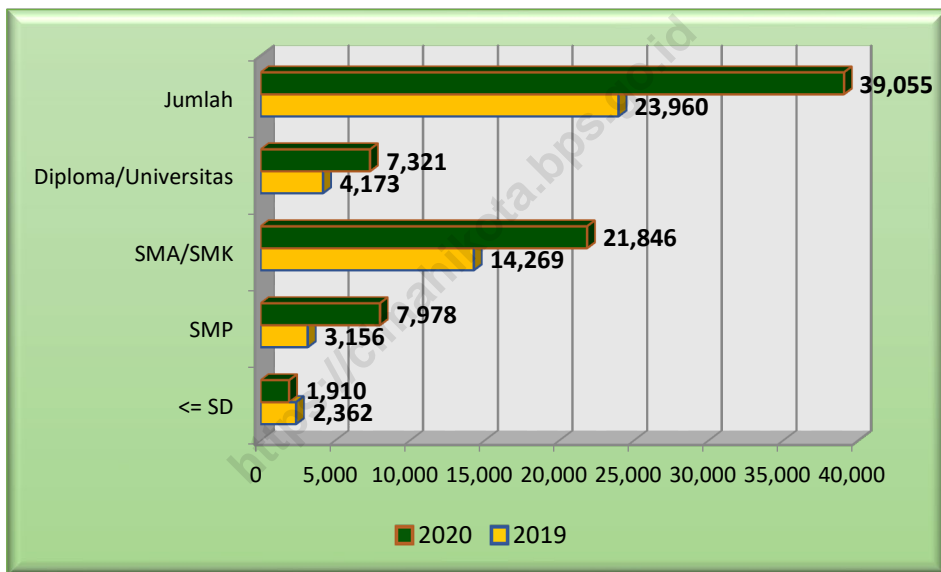
Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2019 dan 2020

4.2. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap individu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan tidak terserapnya tenaga kerja

pada lapangan usaha sesuai dengan yang diinginkan. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan pengangguran yang cukup signifikan baik pada tingkat pendidikan SMP, SMA maupun diploma/universitas yaitu sebesar 152,8 persen, 53,1 persen dan 75,4 persen. Hanya pengangguran dengan pendidikan \leq SD yang menurun 19,1 persen. Secara total jumlah pengangguran tahun 2020 naik sebesar 63,0 persen dibandingkan tahun 2019 yaitu 23.960 orang menjadi 39.055 orang.

Grafik 4.5 Jumlah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi, 2019-2020



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2019 dan 2020

Jumlah pengangguran di Kota Cimahi tahun 2020 yang paling banyak adalah berijazah SLTA/Sederajat yaitu mencapai 21.846 orang, terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 7.577 orang dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 14.269 orang. Demikian juga untuk tingkat pendidikan SLTP/Sederajat dan Diploma/Universitas masing-masing meningkat sebanyak 4.822 dan 3.148 orang, yaitu dari 3.156 dan 4.173 orang menjadi 7.978 dan 7.321 orang. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SD/Sederajat ke bawah mengalami

penurunan jumlah pengangguran. Pengangguran dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat ke bawah menurun dari 2.362 menjadi 1.910 orang.

Tingginya tingkat pengangguran pada penduduk berijazah SLTP/Sederajat sampai yang memiliki ijazah Diploma I/II/III/Sarjana merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Cimahi. Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2012, Pemerintah Kota Cimahi telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, meningkat dari sebelumnya yang hanya 9 tahun. Memacu tingkat pendidikan masyarakat tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, agar potensi yang dimiliki dapat berkontribusi positif dalam pembangunan.

Tahun 2020 TPT penduduk Kota Cimahi menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan seluruhnya mengalami peningkatan, kecuali TPT untuk tingkat pendidikan \leq SD yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. TPT penduduk tingkat pendidikan SMA/Sederajat mencapai 7,44 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,81 persen. Demikian juga untuk TPT penduduk tamat SMP dan Diploma/Universitas masing-masing mencapai 2,72 persen dan 2,49 persen (Tabel 4.1). Hal ini mengindikasikan dalam periode setahun jumlah tenaga kerja lulusan SMA sederajat banyak yang belum terserap oleh lapangan usaha. Bahkan pada masa pandemi tahun 2020 banyak pekerja yang dirumahkan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

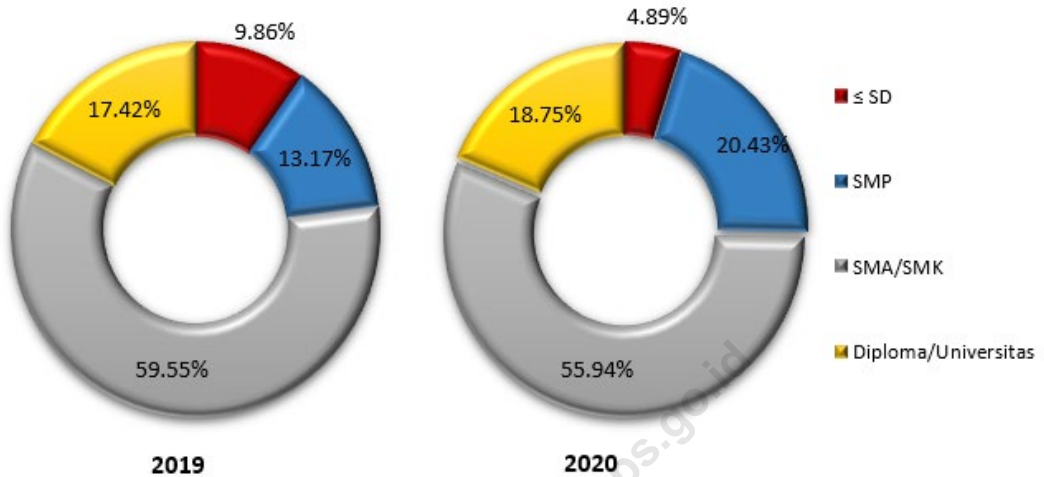
Tabel 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi, 2019 – 2020

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
<= SD	0.80	0.65
SMP	1.06	2.72
SMA/SMK	4.81	7.44
Diploma/Universitas	1.41	2.49
Jumlah	8.08	13.30

Sumber : Sakernas Agustus 2019 dan 2020

Dilihat dari komposisi penganggur menurut tingkat pendidikan, terdapat sedikit pergeseran kontribusi terhadap total pengangguran terbuka. Penganggur lulusan SLTA/ sederajat masih memegang kontribusi terbesar yaitu mencapai 55,94 persen, namun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 59,55 persen. Penganggur dengan tingkat pendidikan SMP naik signifikan yaitu mencapai 20,43 persen dari 13,17 persen, sedangkan pada Diploma/Universitas mencapai 18,75 persen dari total pengangguran terbuka. Perlu upaya keras dari berbagai pihak melihat fenomena tersebut, dimana idealnya lulusan Diploma I/II/III/Sarjana dan lulusan SLTA/ sederajat akan lebih mudah dalam memasuki dunia kerja.

Grafik 4.6 Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi, 2019 - 2020



Sumber : Sakernas Agustus 2019 dan 2020

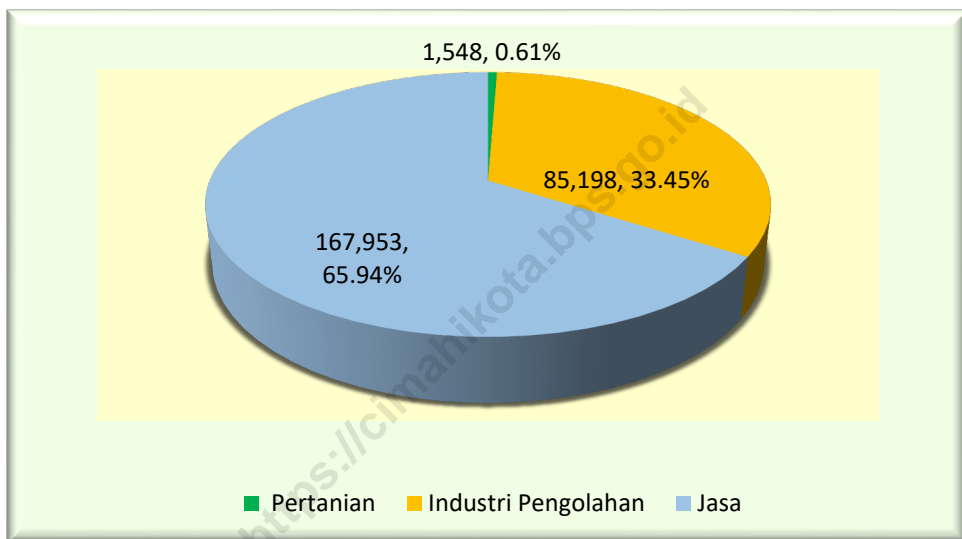
Hal tersebut diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja bagi kelompok tersebut. Dengan pembukaan lapangan kerja baru bagi penduduk di daerahnya sendiri akan menurunkan angka urbanisasi dan diharapkan dapat turut serta dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Sedangkan untuk penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja diharapkan dapat berpartisipasi dengan berwirausaha sehingga dapat turut serta membangun perekonomian di daerah. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah mendorong dan memberi insentif bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwirausaha.

4.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), Industri pengolahan, dan Jasa.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas, Agustus 2020) terlihat sebanyak 85.198 orang atau 33,45 persen tenaga kerja terserap pada sektor industri pengolahan dan 167.953 orang atau sekitar 65,94 persen tenaga kerja terserap pada sektor jasa. Sedangkan sisanya yakni sebanyak 1.548 orang atau 0,61 persen tenaga kerja terserap pada sektor pertanian.

Grafik 4.7 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan di Kota Cimahi, Agustus 2020

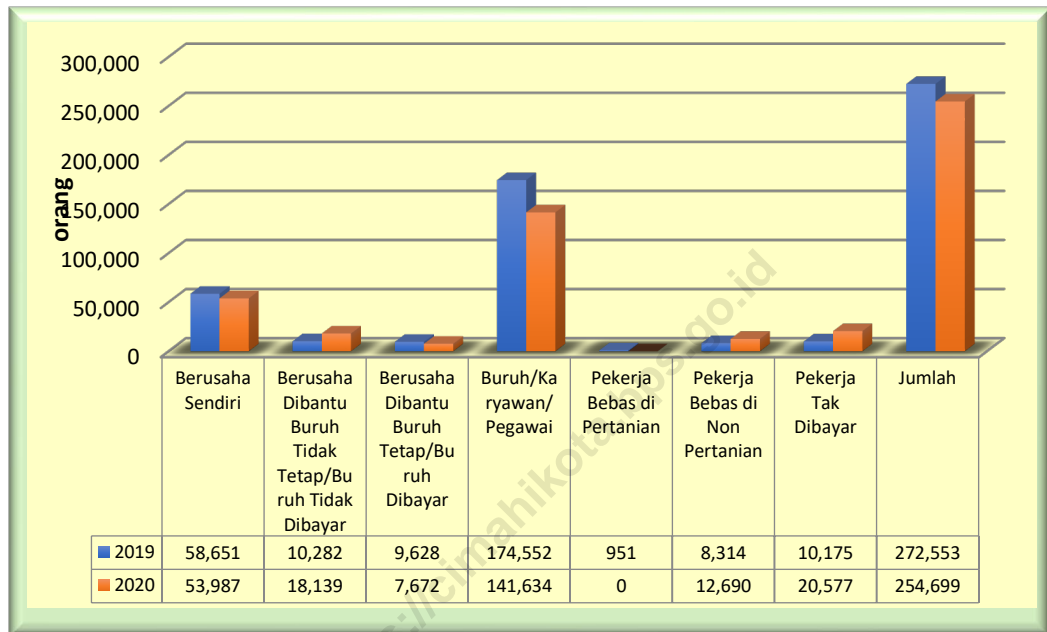


Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2020

Sektor pertanian terdiri atas lima subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan dan hasilnya, dan subsektor perikanan. Namun, karena lahan pertanian di Kota Cimahi yang semakin sempit membuat penyerapan tenaga kerja di sektor pertanianpun sedikit. Tenaga kerja di sektor industri pengolahan cukup besar, terserap pada industri besar/średang ataupun UKM. Tenaga kerja pada sektor jasa merupakan yang terbesar, dalam hal ini terdiri dari sektor perdagangan, rumah makan dan hotel, sektor jasa kemasyarakatan dan sektor selain yang telah disebutkan. Hal tersebut

menunjukkan bahwa sektor ini mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas atau tingkat kesempatan kerja yang relatif lebih besar.

Grafik 4.8 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Cimahi, 2019 – 2020



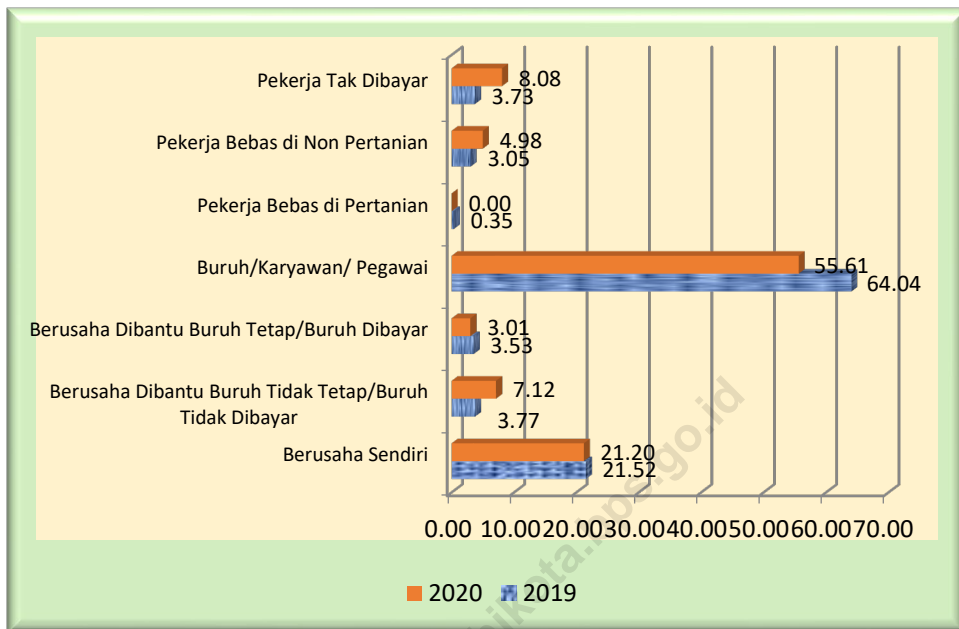
Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2019 dan 2020

Selama tahun 2019 hingga 2020 jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan masih lebih besar dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan pada 2020 mencapai 141.634 orang atau sebesar 55,61 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 32.918 orang atau sebesar 18,86 persen. Penurunan juga terjadi pada tenaga kerja yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan pekerja bebas di pertanian masing-masing turun sebanyak 4.664 orang, 1.956 orang dan 951 orang. Jumlah penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama di Kota Cimahi tahun 2019 – 2020 terlihat pada grafik 4.8.

Pekerja yang berstatus berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja tak dibayar mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan terjadi masing-masing sebesar 7,857 orang, 4.376 orang dan 10.402 orang atau masing-masing naik sebesar 76,42 persen, 52,63 persen dan 102,23 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran status pekerja akibat pandemi covid-19. Dengan adanya PHK, para pekerja/buruh terindikasi beralih menjadi pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar dengan membantu kepala rumah tangga/anggota rumah tangga yang awalnya berusaha sendiri. Selain itu, alternatif lainnya adalah beralih menjadi pekerja bebas di non pertanian.

Pergeseran tersebut terlihat dari struktur status pekerjaan utama penduduk bekerja di Kota Cimahi tahun 2019 – 2020. Persentase jumlah pekerja dengan status sebagai buruh tahun 2020 adalah sebesar 55,61 persen, sedangkan tahun 2019 mencapai 64,04 persen. Struktur bergeser pada pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar, pekerja yang berkerja sendiri dibantu pekerja keluarga/tidak dibayar dan pekerja bebas di non pertanian yang mengalami peningkatan menjadi sebesar 8,08 persen, 7,12 persen dan 4,98 persen. Pada tahun sebelumnya, masing-masing hanya mencapai 3,73 persen, 3,77 persen dan 3,05 persen.

Grafik 4.9 Struktur Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja di Kota Cimahi, 2019 – 2020



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2019 dan 2020

4.4. Sektor Formal dan Sektor Informal

Konsep informal yang digunakan dalam publikasi ini mengacu pada kesepakatan dalam ICLS ke-17 (17th *International Conference on Labor Statisticians*) tahun 2003. Sektor informal adalah sekelompok unit produksi yang merupakan bagian dari sektor rumah tangga, atau apa yang disebut sebagai usaha rumah tangga tidak berbadan hukum (*Household Unincorporated Enterprise*)

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja informal sebagai “karyawan dianggap memiliki pekerjaan informal jika hubungan kerja mereka tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, tidak dikenakan pajak pendapatan, minimnya perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja (seperti pemberitahuan pemecatan sebelumnya, sistem pembayaran gaji tanpa rincian/nota, atau tiadanya hak cuti, ijin sakit, dll)”. Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk konsep

pekerjaan dan bukan untuk tenaga kerja karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: (1) usaha sendiri informal dan (2) pekerjaan upahan informal yang dikerjakan di usaha formal atau informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, tanpa jaminan ketenagakerjaan atau perlindungan sosial. Adapun yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi/kemitraan produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Pembedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi/kemitraan produksi informal (Buku Pedoman Pencacah Survei Sektor Informal 2014, BPS). Dalam konteks ini Pekerja Informal (*Informal Employee*) merupakan pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian.

Tabel 4.2 Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal dan Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal (Rupiah) di Kota Cimahi, Agustus 2019 – 2020

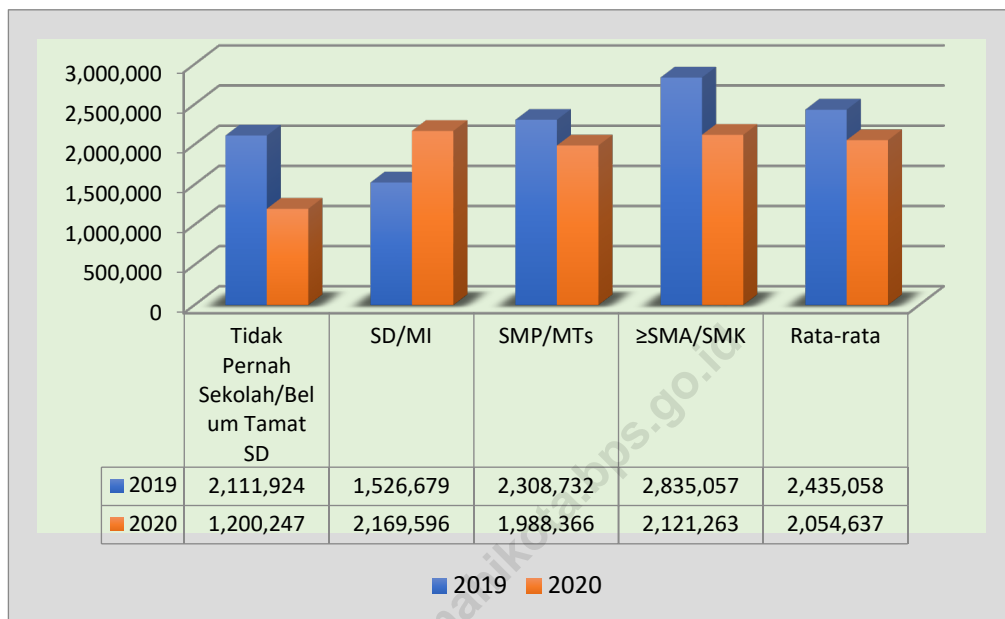
Jenis Pekerja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Gaji bersih		
Pekerja Formal	3,437,539	3,327,132
Pendapatan Bersih		
Pekerja Informal	2,435,058	2,054,637

Sumber : Sakernas Agustus 2019 dan 2020

Pada dasarnya semua pekerja memiliki tujuan untuk memperoleh penghasilan. Berdasarkan hasil survei, rata-rata gaji bersih sebulan pekerja formal dan pendapatan bersih sebulan pekerja informal pada tahun 2020 masing-masing mencapai Rp. 3,327,132,- dan Rp. 2,054,637,- atau mengalami penurunan sebesar 3,2 persen dan 15,6 persen dari Rp. 3,437,539,- dan Rp. 2,435,058,-. Dampak pandemi covid-19 sangat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh para pekerja atau para pelaku ekonomi. Selain adanya PHK, sebagian perusahaan juga melakukan pengurangan jam/hari kerja sehingga gaji per bulan yang diterima pekerja berkurang. Demikian halnya dengan pekerja informal juga ikut terdampak pandemi dimana pendapatannya menurun dengan tingkat persentase yang lebih besar.

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka terlihat bahwa pendapatan bersih sebulan pekerja informal semua tingkat pendidikan mengalami penurunan pada tahun 2020, kecuali pada pekerja informal dengan tingkat pendidikan SD yang masih mampu meningkatkan pendapatannya. Hal tersebut tidak dapat digeneralisir bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada besarnya pendapatan pekerja informal. Pada pekerja informal juga sangat dipengaruhi oleh lapangan usaha yang digeluti, pengalaman, kreatifitas dan daya juang dari pelaku usahanya. Pada tahun 2019, pendapatan bersih sebulan pekerja informal dengan pendidikan di atas SMA/SMK merupakan pendapatan yang tertinggi yaitu sebesar Rp. 2.835.057. Secara logika, semakin tinggi tingkat pendidikan memiliki kecenderungan seseorang untuk bekerja lebih berkembang, meski tidak dipungkiri ada pekerja informal dengan pendidikan yang lebih rendah yang sukses karena memiliki keuletan dan daya juang yang tinggi.

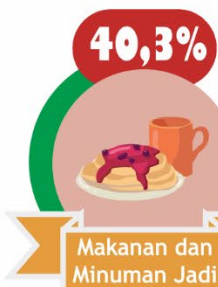
Grafik 4.10 Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal (Rupiah) Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Cimahi, Agustus 2019 – 2020



Sumber : Sakernas Agustus 2019 dan 2020



POLA KONSUMSI PENDUDUK KOTA CIMAHI



PENGELUARAN MAKANAN



PENGELUARAN NON MAKANAN



PENGELUARAN TERBESAR

Perumahan dan Fasilitas
48,3 persen



Barang Tahan Lama
6,5 persen



Barang dan Jasa
25,6 persen



Pajak, Pungutan, dan Asuransi
5,1 persen



Taraf dan Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

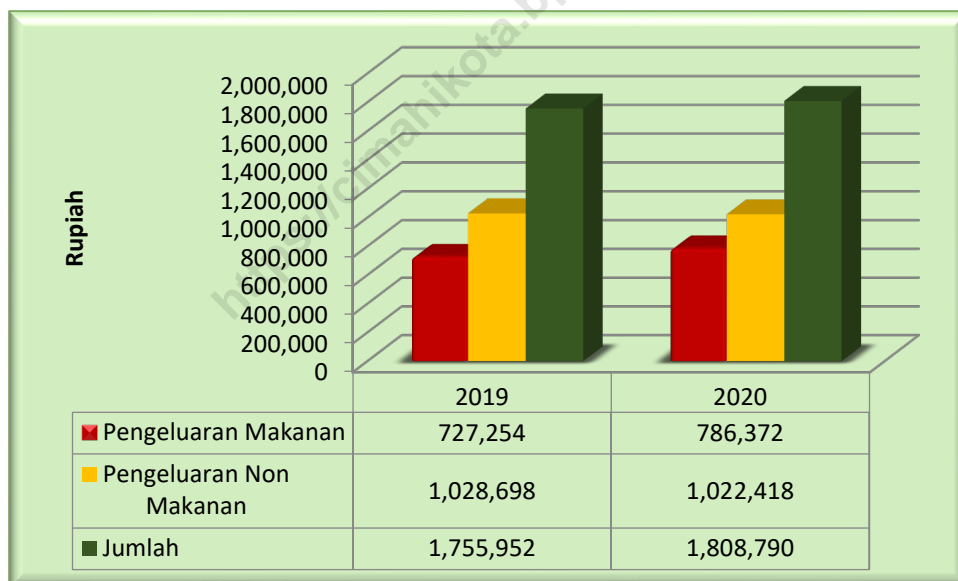
Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.808.790,- atau naik sebesar 3,0 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai

Rp 1.755.953,-. Pada tahun 2020 pengeluaran non makanan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pengeluaran makanan mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dipahami, bahwa pada masa pandemi covid-19, dengan kondisi perekonomian yang turut terkontraksi, masyarakat Kota Cimahi lebih mengutamakan pengeluaran makanan daripada non makanan dan menekan pengeluaran yang bersifat sekunder maupun tersier. Namun rata-rata pengeluaran non makanan masih lebih tinggi dari pengeluaran makanan yaitu masing-masing sebesar Rp 1.022.418,- dan Rp 786.372,-, atau sebesar 56,5 persen dan 43,5 persen terhadap total pengeluaran.

Grafik 5.1. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan (Rupiah) Menurut Kelompok Komoditas di Kota Cimahi, 2019 - 2020



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi 2019 dan 2020

Tabel 5.1 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran dan Kelompok Komoditas (Rupiah) di Kota Cimahi, 2020

Kelompok Pengeluaran	Kelompok Komoditas		Jumlah
	Makanan	Non Makanan	
(1)	(2)	(3)	(4)
40 Persen Terbawah	463,909	337,654	801,563
40 Persen Tengah	846,941	822,625	1,669,566
20 Persen Teratas	1,310,813	2,795,945	4,106,758
Rata-rata	786,372	1,022,418	1,808,790

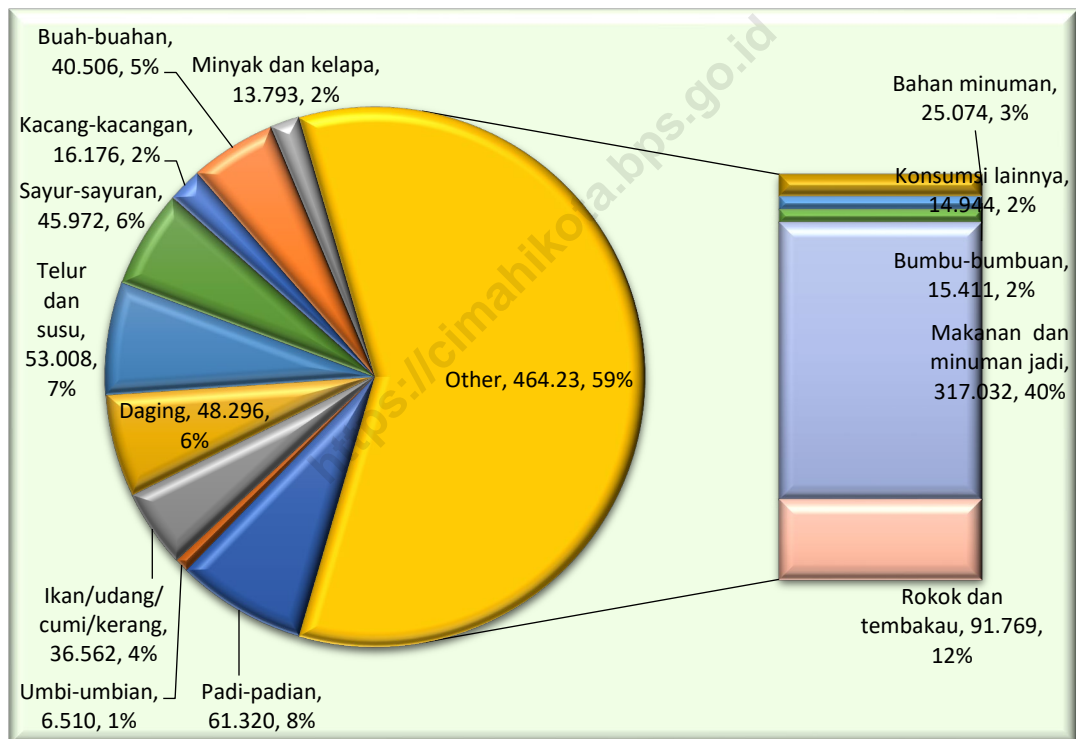
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi 2019 dan 2020

Tabel 5.1 menyajikan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok pengeluaran dan kelompok barang. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kota Cimahi sebesar Rp. 1.808.790,- yang dibagi menjadi Rp. 1.022.418,- untuk bukan makanan dan Rp. 786.372,- untuk makanan. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah lebih banyak digunakan untuk makanan. Pengeluaran kelompok 40 persen tengah relatif berimbang untuk makanan dan non makanan. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran 20 persen teratas, pengeluaran non makanan lebih besar dari pengeluaran makanan.

Grafik 5.2 memperlihatkan proporsi pengeluaran rata-rata menurut kelompok barang makanan. Jika kelompok makanan dirinci menurut sub kelompoknya, terlihat bahwa sub kelompok makanan dan minuman jadi merupakan sub kelompok dengan rata-rata pengeluaran per kapita yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap pengeluaran kelompok makanan yaitu sebesar 40

persen (Rp. 317.032,-). Diikuti sub kelompok tembakau dan sirih sebesar 12 persen (Rp. 91.769,-) dan padi-padian sebesar 8 persen (Rp. 61.320,-). Hal ini memperlihatkan bahwa penduduk Kota Cimahi banyak mengonsumsi makanan jadi. Fenomena ini dapat menjadi peluang bagi pemerintah maupun pelaku ekonomi untuk membangun pusat kuliner makanan khas Kota Cimahi sehingga secara langsung dapat meningkatkan pendapatan Kota Cimahi.

Grafik 5.2 Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Makanan di Kota Cimahi, 2020

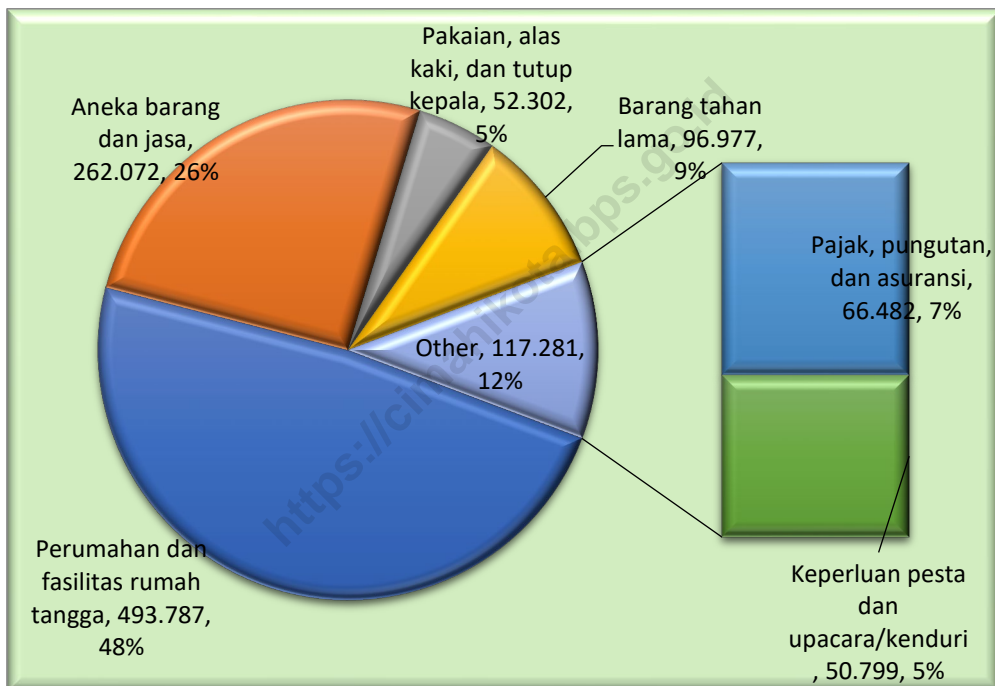


Sumber : Pola Konsumsi Penduduk Jawa Barat 2020

Grafik 5.3 memperlihatkan proporsi pengeluaran rata-rata menurut kelompok barang non makanan. Jika kelompok non makanan dirinci menurut sub kelompoknya, terlihat pada bahwa pengeluaran sub kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga merupakan sub kelompok dengan rata-rata pengeluaran per

kapita yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap pengeluaran kelompok non makanan yaitu sebesar 48 persen (Rp. 493.787,-). Diikuti sub kelompok aneka barang dan jasa sebesar 26 persen (Rp. 262.072,-) dan sub kelompok barang tahan lama sebesar 9 persen (Rp. 96.977,-).

Grafik 5.3 Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Non Makanan di Kota Cimahi, 2020

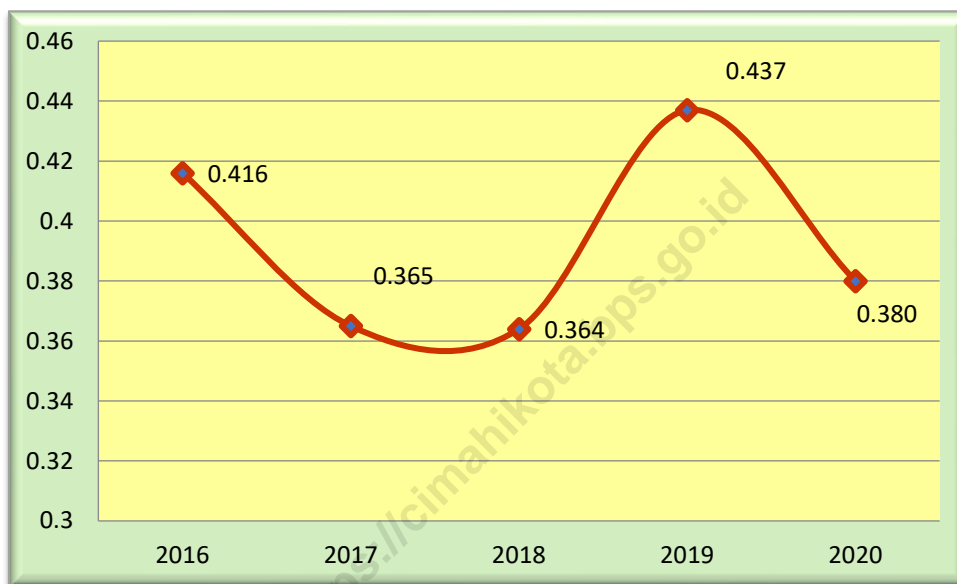


Sumber : Pola Konsumsi Penduduk Jawa Barat 2020

Data pengeluaran digunakan sebagai *proxy* untuk penghitungan distribusi pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi. Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil

pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan indikator yang sering digunakan, yaitu Indeks Gini.

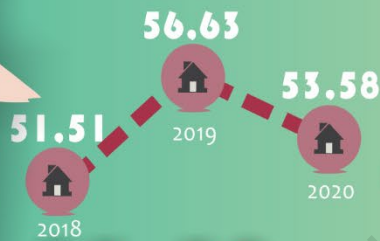
Grafik 5.4 Indeks Gini Menurut Kota Cimahi, 2016 – 2020



Sumber : Tabel Dinamis Gini Rasio Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota

Jika dilihat dari grafik 5.2, indeks gini Kota Cimahi terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 dengan indeks gini rasio mencapai 0,416 dan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2018 menjadi 0,364. Namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 0,437. Pada tahun 2020, indeks gini Kota Cimahi mencapai 0,380. Dengan melihat angka ini, pemerataan pendapatan masyarakat di Kota Cimahi ada pada tingkat ketimpangan sedang.

STATISTIK PERUMAHAN KOTA CIMAHI



Rumah tangga dengan Status Kepemilikan milik sendiri **menurun** pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019

53.58 persen rumah tangga dengan Status Kepemilikan rumah tinggal milik sendiri



99.19 persen rumah tangga memiliki dengan akses sumber air utama yang layak untuk MCK

81.42 persen rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri



71.45 persen rumah tangga memiliki tempat pembuangan tinja yang layak

Perumahan dan Lingkungan

Fungsi rumah adalah sebagai tempat tinggal, selain itu rumah juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Status sosial seseorang yang semakin tinggi, peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik dan fasilitas yang lengkap semakin besar. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1 Kualitas Rumah Tinggal

Terdapat beberapa kriteria rumah tinggal yang harus dipenuhi sehingga dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal. Kriteria tersebut diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2019 – 2020

Indikator	Satuan	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Atap beton, genteng dan asbes	%	99,55	98,37
Dinding terluas tembok dan kayu	%	98,30	99,81
Rata-rata luas lantai per kapita ≥ 10 m²	%	67,51	63,46

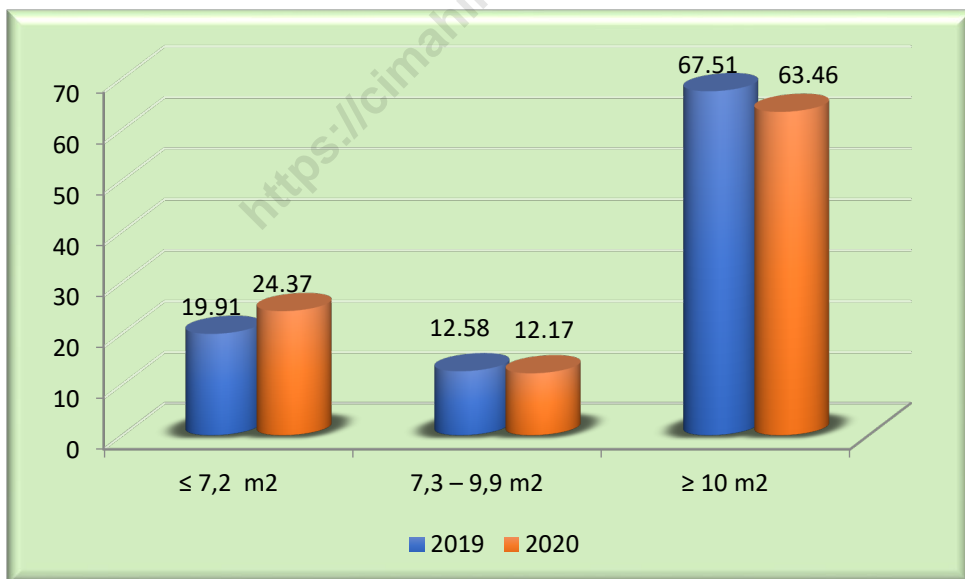
Sumber : Susenas, 2019 dan 2020

Indikator yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Berdasarkan hasil Susenas 2019 rumah tinggal dengan atap beton, genteng, dan asbes mencapai 99,56 persen dan pada tahun 2020 sedikit menurun menjadi 98,37 persen, sedangkan pada kondisi bangunan rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas tembok dan kayu naik dari 98,30 persen menjadi 99,81 persen pada tahun 2020.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) menurut Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah yang meliputi aktifitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Berdasarkan hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Selanjutnya menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m².

Data hasil Susenas tahun 2020 menunjukkan bahwa di Kota Cimahi persentase rumah tangga yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita $\geq 10 \text{ m}^2$ adalah sebesar 63,46 persen. Jika dibandingkan dengan data tahun 2019, maka terjadi penurunan persentase rumah tangga yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita $\geq 10 \text{ m}^2$ yang mencapai 67,51 persen. Penurunan ini kemungkinan disebabkan adanya pengaruh pandemi covid-19, dimana banyak pekerja/buruh yang terpaksa kembali ke rumah orang tua karena terkena PHK dan menjadi pekerja keluarga/tidak dibayar. Kemungkinan lainnya adalah pada kondisi perekonomian saat ini mengharuskan masyarakat harus lebih mengurangi pengeluaran untuk menyewa rumah dengan mencari rumah lebih murah/lebih kecil.

Grafik 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kota Cimahi, 2019 - 2020



Sumber : Susenas, 2019-2020

Persentase rumah tangga menurut luas lantai perkapita di Kota Cimahi dapat dilihat pada Grafik 6.1. Berdasarkan Grafik tersebut terlihat terjadi

penurunan persentase rumah tangga dengan luas lantai $\geq 10 \text{ m}^2$ dan $7,3 - 9,9 \text{ m}^2$ pada tahun 2020. Sebaliknya, terjadi peningkatan persentase rumah tangga pada luas lantai per kapita $\leq 7,2 \text{ m}^2$ yaitu dari 19,91 persen menjadi 24,37 persen.

6.2 Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal merupakan pemenuhan atas kebutuhan aktivitas seluruh anggota rumah tangga. Kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, terutama air bersih yang tersedia dalam jumlah yang cukup untuk keperluan minum dan masak.

Tabel 6.2. Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2019 - 2020

Indikator	Satuan	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Air minum bersih *)	%	90,68	91,92
Jamban sendiri	%	80,08	81,42
Jamban sendiri dengan tangki septik	%	64,45	70,19
Sumber penerangan listrik PLN	%	99,38	99,09
*) Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja 10 m+			

Sumber : Susenas, 2019 dan 2020

Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2020 mencapai 91,92 persen. Air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi

ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja lebih dari 10 m.

Selain fasilitas ketersediaan air minum, penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting perannya. Pembuangan kotoran manusia yang tidak sesuai dengan standar kesehatan akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Dampak lebih lanjut dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Salah satu fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Selama tahun 2019-2020 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri mengalami peningkatan dari 80,08 persen menjadi 81,42 persen. Selanjutnya selain telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2020 rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik sudah mencapai 70,19 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 64,45 persen.

Selain air bersih dan jamban, fasilitas rumah tinggal lainnya yang juga penting adalah penerangan. Secara umum sumber penerangan utama berasal dari listrik baik dari PLN maupun Non PLN. Cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Hasil Susenas tahun 2020 menunjukkan bahwa 99,09 persen rumah tangga di Kota Cimahi telah menikmati fasilitas penerangan listrik PLN. Dengan angka ini bisa dikatakan hampir seluruh masyarakat Kota Cimahi

sudah menikmati fasilitas listrik dari PLN dan hanya tersisa 0,91 menggunakan listrik non PLN.

6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Hasil Susenas 2020 menunjukkan bahwa rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 53,58 persen, sisanya 46,42 persen adalah bukan milik sendiri. Dalam hal ini terjadi pergeseran atau penurunan persentase dari tahun sebelumnya dimana rumah milik sendiri sebesar 56,63 persen dan bukan milik sendiri sebesar 43,37 persen.

Tabel 6.3. Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2019 - 2020

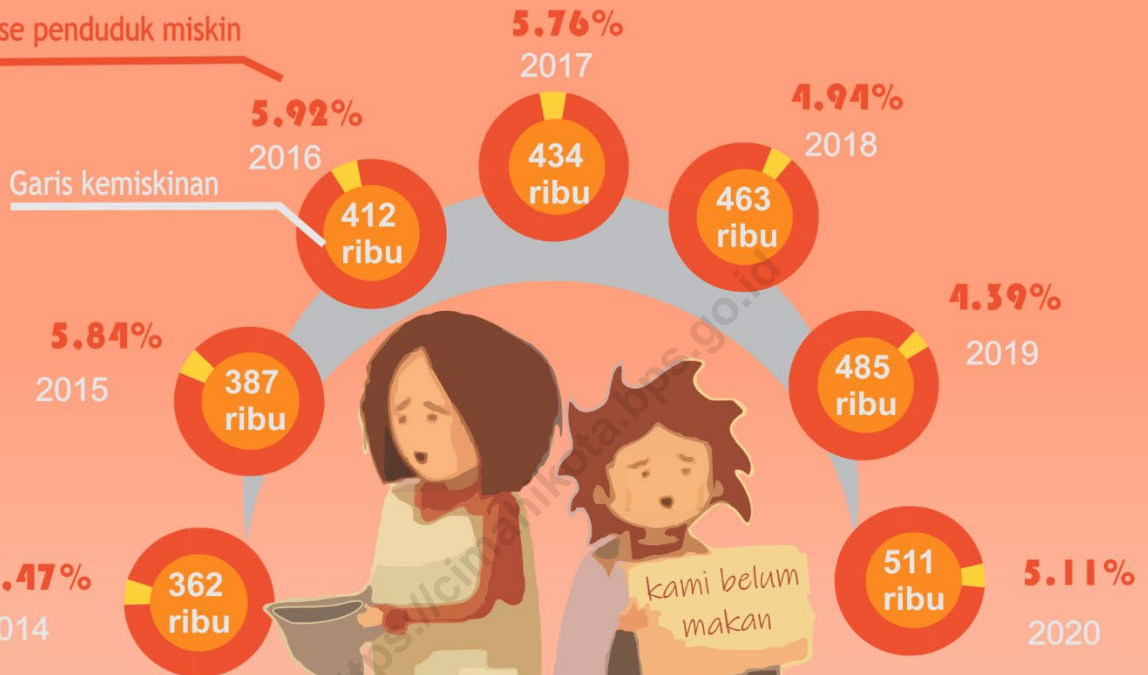
Indikator	Satuan	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik sendiri	%	56,63	53,58
Bukan Milik Sendiri	%	43,37	46,42

Sumber : Susenas, 2019 dan 2020

Potret Kemiskinan Kota Cimahi

Garis kemiskinan Kota Cimahi memiliki tren kenaikan sepanjang tahun 2014 hingga 2020. Sementara persentase kemiskinan cenderung menurun dari tahun 2016 hingga 2019 dan kembali meningkat di tahun 2020

Persentase penduduk miskin



Kesenjangan dan sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin cenderung berfluktuasi selama periode 2014 hingga 2020

Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah

kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang arakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

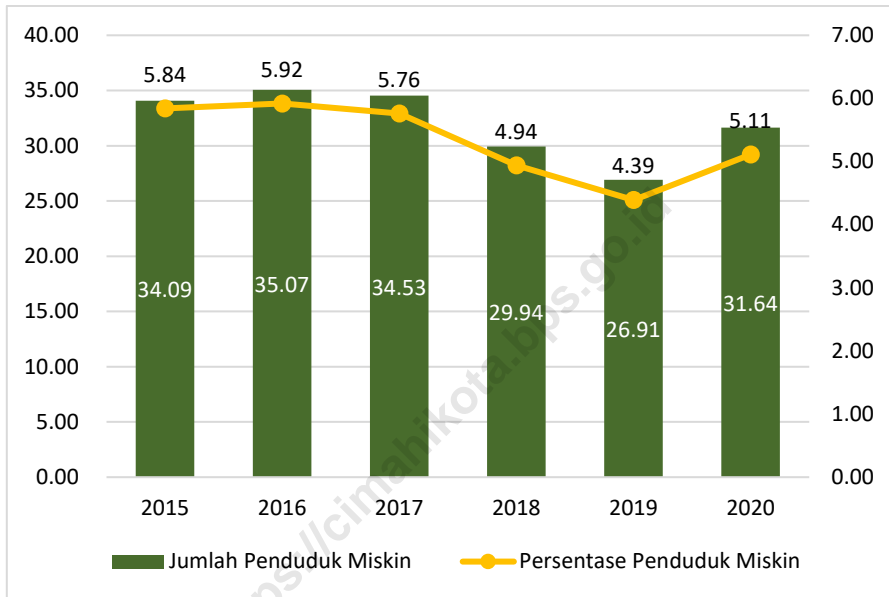
Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai program pemberantasan kemiskinan dirancang dan diterapkan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Terbentuknya Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai pengganti Millenium Development Goals (MDGs) merupakan agenda pembangunan Pasca MDGs yang berakhir tahun 2015. Target yang pertama dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator pendukung antara lain menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari \$1,25 per hari. Indikator lain yang terkait dalam mengakhiri kemiskinan antara lain melindungi orang yang miskin dan rentan dengan sistem perlindungan sosial.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin

Jumlah penduduk Kota Cimahi yang berada di bawah garis kemiskinan terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di Kota Cimahi menyentuk angka 4,94 persen. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan menjadi 26,91 ribu jiwa atau sekitar 4,39 persen. Memasuki tahun 2020, angka kemiskinan di Kota Cimahi kembali meningkat menjadi 5,11 persen atau sebesar 31,64 ribu jiwa. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin ini salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang semakin meluas. Pandemi ini mengakibatkan menurunnya

pendapatan masyarakat dan perubahan perilaku pada kegiatan ekonomi sehingga memicu kemiskinan terutama pada penduduk yang berada dalam kategori rentan miskin.

**Grafik 7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Cimahi, 2015-2020
(Ribuan Jiwa)**



Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2020

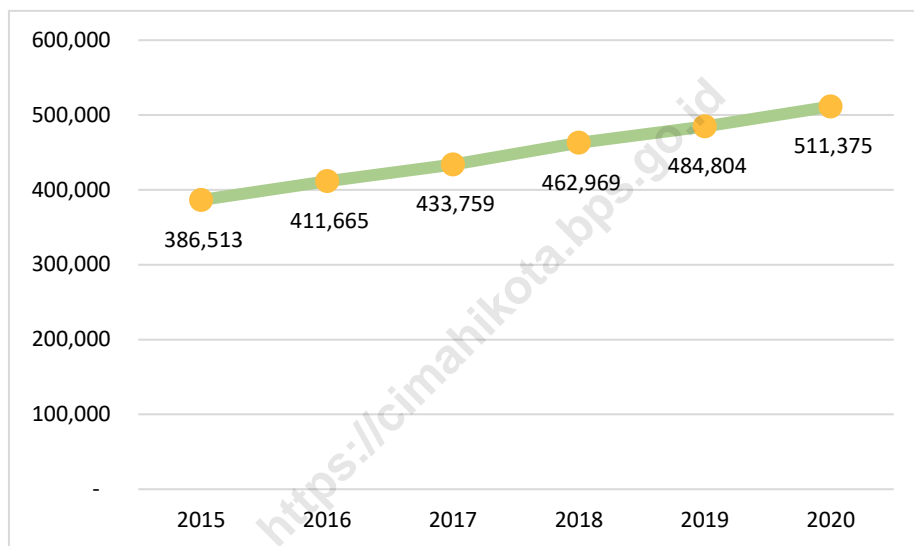
Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga; kondisi perumahan; dan persebarannya menurut kabupaten/kota. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Garis kemiskinan merupakan jumlah uang minimal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan

dan bukan makanan per orang untuk satu bulan. Penduduk akan dikategorikan miskin jika rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan selalu mengalami peningkatan setiap tahun mengikuti kenaikan harga komoditas bahan makanan dan bukan makanan. Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Kota Cimahi sebesar Rp 511.375 per kapita per bulan. Dengan kata lain, biaya hidup di Kota Cimahi juga semakin meningkat dibanding tahun 2019.

Grafik 7.2 Garis Kemiskinan Kota Cimahi, 2015-2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)

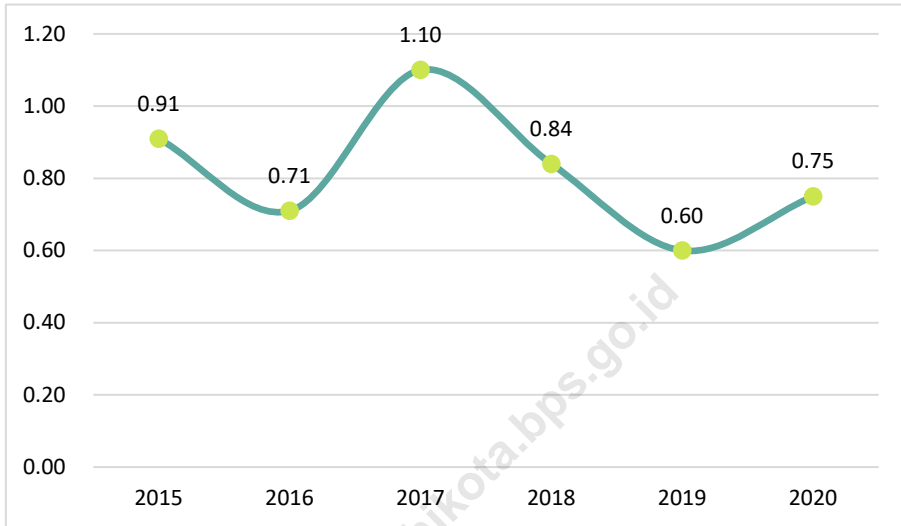


Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2020

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kondisi kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2015 – 2020, P1 mengalami fluktuasi, dimana nilai tahun 2020 kembali meningkat menjadi 0,75. Meningkatnya indeks P1 ini diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga membuat turunnya pendapatan masyarakat terutama masyarakat dalam kategori miskin dan rentan miskin. Selain itu, Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan

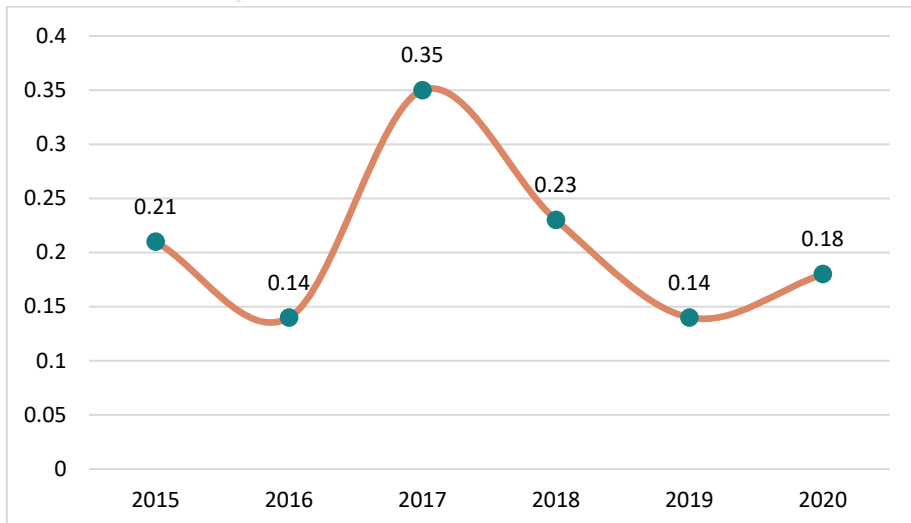
semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Grafik 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Cimahi 2015 - 2020



Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2020

Grafik 7.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kota Cimahi, 2015 - 2020



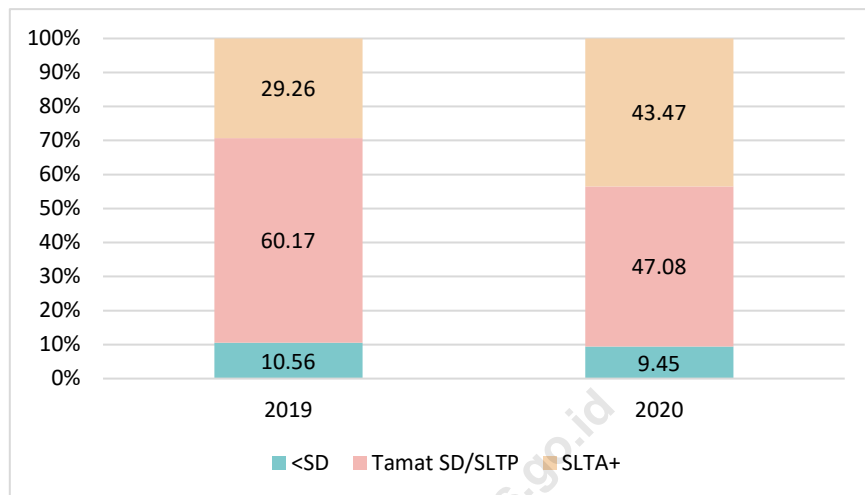
Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2020

Selain indeks kedalaman kemiskinan, ada indeks keparahan kemiskinan (P2) yang bisa digunakan untuk melihat kondisi kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan P1, P2 juga mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 0,18. Sama halnya dengan P1, kenaikan P2 ini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 sehingga membuat masyarakat untuk menahan pengeluarannya baik untuk makanan maupun bukan makanan. Penurunan nilai indeks menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil. Apabila semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

7.3 Karakteristik Pendidikan

Perbaikan tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang baik cenderung mengupayakan anggota rumah tangga yang dipimpinnya juga memiliki tingkat pendidikan yang baik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga cenderung akan memiliki tingkat pendapatan yang semakin tinggi, dan semakin kecil kemungkinan rumah tangga tersebut berada dalam kondisi miskin. Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani pengentasan kemiskinan selain pendidikan kepala rumah tangga yaitu pendidikan anak dari rumah tangga miskin. Anak dalam rumah tangga miskin apabila diberi kesempatan menempuh pendidikan yang memadai maka besar kemungkinan untuk keluar dari kemiskinannya di masa depan.

Grafik 7.5 Persentase Penduduk Miskin Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Cimahi, 2019- 2020



Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2020

Persentase penduduk miskin di Kota Cimahi menurut pendidikan yang ditamatkan tahun 2020 menunjukkan sebagian besar penduduk miskin adalah tamat SLTP ke bawah. Sebanyak 47,08 persen penduduk miskin tamat SD/SLTP dan sederajat. Kemudian 9,45 persen penduduk miskin adalah tidak tamat SD. Adapun penduduk miskin yang pendidikannya tamat SLTA/sederajat atau lebih mencapai 43,47 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesempatan rumah tangga untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan rumah tangga tersebut rentan dengan kondisi miskin.

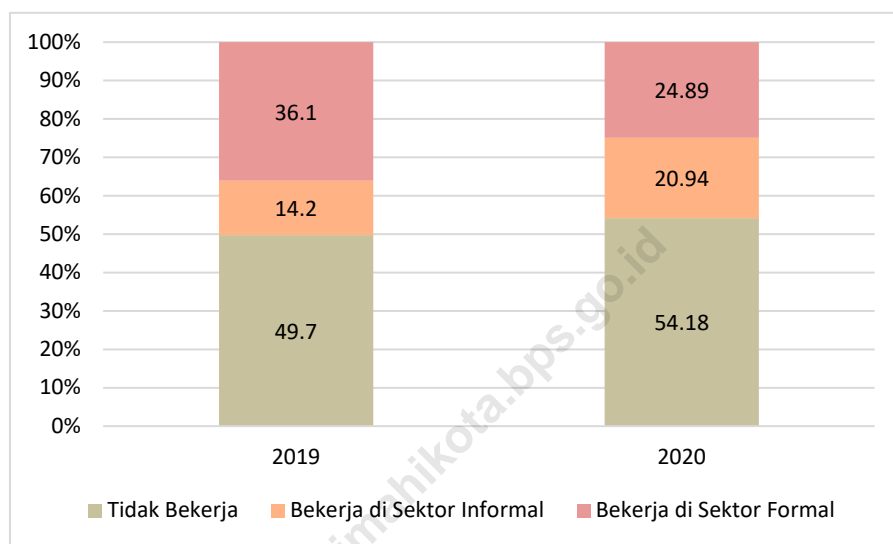
Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka terlihat adanya penurunan taraf pendidikan yang ditamatkan bagi penduduk miskin pada tingkat SLTP ke bawah yang semula sebesar 60,17 persen. Selain itu, terjadi peningkatan pada taraf pendidikan yang ditamatkan bagi penduduk miskin pada tingkat SLTA ke atas, yang semula sebesar 29,26 persen.

7.4 Karakteristik Ketenagakerjaan

Indikator kedua setelah pendidikan yang dapat digunakan untuk melihat karakteristik rumah tangga miskin yaitu ketenagakerjaan. Persentase penduduk

miskin yang tidak bekerja mencapai 54,18 persen pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka mengalami peningkatan sebesar 4,48 persen.

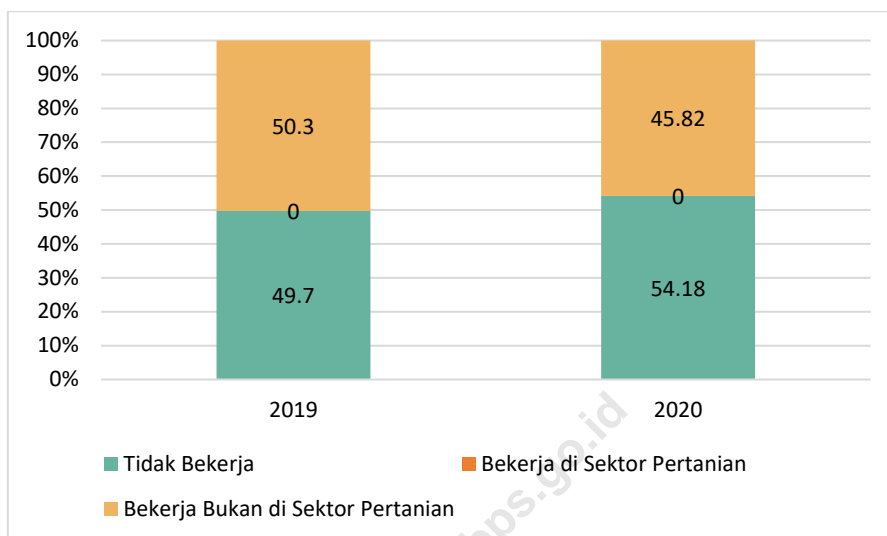
Grafik 7.6 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kota Cimahi, 2019- 2020



Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2020

Menurut status pekerjaannya, pada tahun 2020 penduduk miskin lebih banyak yang bekerja di sektor formal dibanding sektor informal. Sebanyak 24,89 persen penduduk miskin bekerja di sektor formal. Sedangkan 20,94 persen bekerja di sektor informal. Dibandingkan dengan tahun 2019, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor formal mengalami penurunan, berlawanan dengan persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal justru mengalami peningkatan.

Grafik 7.7 Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja dan Bidang Pekerjaan di Kota Cimahi, 2019 – 2020



Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2020

Pada tahun 2019 dan 2020, tidak ada penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian. Persentase penduduk yang bekerja bukan di sektor pertanian yang sebesar 45,82 persen pada tahun 2020, sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 50,30 persen

7.5 Karakteristik Perumahan

Karakteristik rumah tangga miskin yang tak kalah penting untuk diperhatikan selain pendidikan dan ketenagakerjaan adalah karakteristik perumahan. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin kualitas hidup masih rendah jika dilihat dari keluasaannya dalam beraktivitas di dalam rumah.

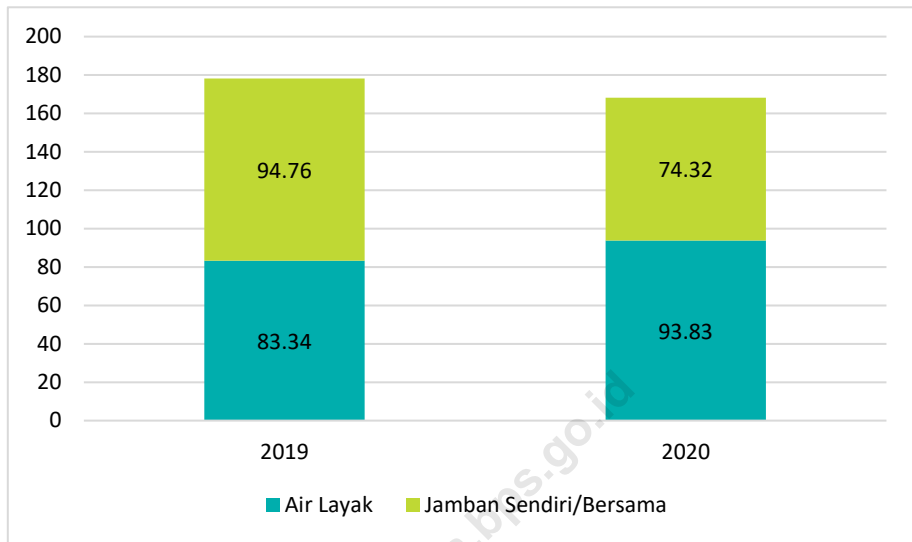
Ketersediaan fasilitas air minum dan jamban juga merupakan diantara karakteristik perumahan yang perlu mendapat perhatian. Di Kota Cimahi, persentase rumah tangga miskin yang mengakses air layak mencapai 93,83 persen pada tahun 2020. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang

terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Pemerintah terus mengupayakan peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih. Air bersih sebagai sumber air minum merupakan komponen penting dalam mendukung kehidupan yang lebih sehat. Air minum yang tidak terjamin kebersihannya berbahaya bagi kesehatan karena dapat menimbulkan penyakit. Ketika kepala rumah tangga atau ada anggota rumah tangga yang sakit, pengeluaran untuk berobat akan semakin menambah beban rumah tangga tersebut yang pada akhirnya semakin mendorong ke tingkat kemiskinan yang semakin dalam (TNP2K, 2010).

Ketersediaan sanitasi untuk setiap rumah tangga miskin di Kota Cimahi relatif belum memadai. Hal ini ditunjukkan dengan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan fasilitas jamban sendiri/bersama hanya sebesar 74,32 persen pada tahun 2020.

Grafik 7.8 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama Kota Cimahi , Tahun 2019 – 2020



Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2020



PADA TAHUN 2020
AKSES TERHADAP
INTERNET
MENINGKAT
SEBESAR 3.32%

Akses Internet
Telepon Seluler

TAHUN 2020
TERJADI
PENURUNAN
RT PENERIMA
KPS/KKS

DI KOTA
CIMAHI



SOSIAL DAN
LAINNYA

Sosial Lainnya

Pada bab ini akan diuraikan beberapa data sosial lainnya yang merupakan pendekatan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Cimahi. Cakupan pembahasan meliputi data Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pelayanan Kesehatan.

Pengertian akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Harga telepon pintar yang semakin terjangkau dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi.

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan gratis. Pelayanan kesehatan gratis tersebut memungkinkan masyarakat dapat mengalihkan pendapatannya pada keperluan hidup lainnya guna meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu pula rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas.

8.1 Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Peningkatan penggunaan telepon seluler (*handphone*) cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon kabel/rumah. Telepon rumah semakin jarang digunakan dan cenderung ditinggalkan. Pada saat ini masyarakat cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana dan lebih bersifat pribadi. Selain itu pula tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar

(foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain. Pada tahun 2020 persentase penduduk yang memiliki akses internet melalui telepon seluler sebesar 98,71 persen. Nilai ini meningkat jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 95,16 persen.

Tabel 8.1. Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi Tahun 2019 dan 2020

Indikator	Satuan	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Telepon Seluler	%	95,16	98,71
Akses Internet	%	70,84	74,16

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2020

Selanjutnya terkait penduduk yang memiliki akses internet secara keseluruhan di Kota Cimahi pada tahun 2020 mencapai 74,16 persen. Persentase ini meningkat jika dibandingkan tahun 2019. Peningkatan ini akan terus berlangsung seiring dengan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Kebutuhan internet masyarakat juga terus meningkat sejalan dengan perkembangan dunia digital. Misalnya, semakin maraknya *online shop*, maupun kegiatan ekonomi lain yang dilakukan secara digital, kebutuhan pada media sosial, serta transportasi *online*. Kebutuhan internet diproyeksikan akan terus meningkat. Salah satunya disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat untuk tetap di rumah. Kegiatan *Work From Home (WFH)*, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), serta kebutuhan hiburan ketika di rumah akan terus mendorong penggunaan internet.

8.2 Pelayanan Kesehatan Gratis

Usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dari segi kesehatan diantaranya adalah program pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat misalnya Program Puskesmas Gratis yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang lebih ditujukan kepada rumah tangga yang tergolong kurang mampu. Jaminan pelayanan kesehatan merupakan wujud pelayanan kesehatan yang baik. Jumlah penerima jaminan pelayanan kesehatan yang semakin meningkat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu karena alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk berobat dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan yang lain.

Berdasarkan hasil data 2020, persentase rumah tangga yang memiliki atau penerima jaminan sosial Pensiun/Veteran sebanyak 11,10 persen. Penerima Jaminan Hari Tua sebanyak 13,46 persen, Penerima Asuransi Kecelakaan Kerja sebanyak 15,51 persen dan Penerima Jaminan/Asuransi kematian sebanyak 11,73 persen serta penerima pesangon karena PHK sebanyak 6,28 persen. Diharapkan dengan meningkatnya rumah tangga yang menerima jaminan pelayanan kesehatan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Cimahi. Dengan meningkatnya derajat kesehatan diharapkan kapabilitas masyarakat untuk bisa hidup sejahtera juga akan meningkat.

Tabel 8.2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial Selama Setahun Terakhir 2020

Indikator	Satuan	2020
(1)	(2)	(3)
Jaminan Pensiun/Veteran	%	11,10
Jaminan Hari Tua	%	13,46
Asuransi Kecelakaan Kerja	%	15,51
Jaminan/Asuransi Kematian	%	11,73
Pesangon (PHK)	%	6,28

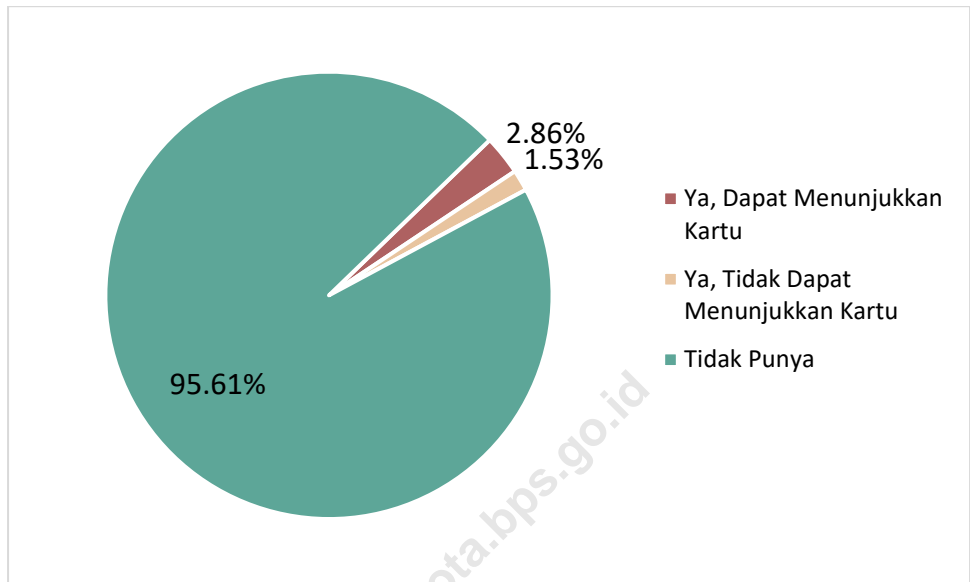
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2020

8.3 Kartu Perlindungan Sosial dan Kartu Keluarga Sejahtera

Usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dari segi kesehatan diantaranya adalah adalah Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2013 yang lebih ditujukan kepada rumah tangga yang tergolong kurang mampu. Jaminan pelayanan kesehatan merupakan wujud pelayanan kesehatan yang baik.

Pada periode tahun 2020, persentase rumah tangga yang menerima kartu perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang dapat menunjukkan kartu sebanyak 2,86 persen, tidak dapat menunjukkan kartu sebanyak 1,53 persen, sedangkan yang tidak punya sebanyak 95,61 persen, seperti terlihat pada grafik 8.1.

**Grafik 8.1. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu
Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Tahun 2020**



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2020

LAMPIRAN

<https://cimahkota.pps.go.id>

ISTILAH TEKNIS

Air Minum Bersih	Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (septic tank) > 10 meter.
Angka Beban Tanggungan	Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.
Angka Harapan Hidup	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
Angka Kematian Bayi	Probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).
Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)	Banyaknya kelahiran per seribu wanita dari golongan umur 15-49 tahun yang terjadi pada waktu tertentu.
Angka Kelahiran Total	Banyaknya anak yang diperkirakan dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu tanpa memperhitungkan angka kelangsungan hidup wanita.
Angka Kelahiran Kasar	Angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran untuk setiap seribu penduduk yang terjadi di suatu daerah pada waktu tertentu.
Angka Kesakitan	Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.
Angka Melek Huruf	Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.
Angka Partisipasi Sekolah	Rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.

Angka Putus Sekolah	Proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.
Angka Partisipasi Murni	Proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.
Angkatan Kerja	Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.
Bekerja	Melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai bekerja.
Indeks Gini	Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.
Jumlah Jam Kerja Seluruhnya	Jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan).
Kepadatan Penduduk	Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.
Lapangan Usaha	Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Kegiatan in mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam satu digit.
Masih Bersekolah	Sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
Penganggur	Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Pengangguran Terbuka	Mereka yang termasuk pengangguran terbuka adalah : a.yang mencari pekerjaan b.yang mempersiapkan usaha c.yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan d.yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Pengeluaran	Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.
Pekerja Tidak Dibayar	Seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji.
Perjalanan	Melakukan perjalanan pergi pulang (PP) sejauh minimal 100 Kilometer dan tidak dalam rangka mencari nafkah dan tidak dilakukan secara rutin.
Perkotaan	Karakteristik sosial ekonomi dari wilayah administratif terkecil. Wilayah ini dikatakan sebagai perkotaan jika memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, lapangan kegiatan ekonomi utama, fasilitas-fasilitas perkotaan (jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya). Secara operasional penentuan daerah perkotaan dibuat dengan sistim skoring tertentu. Prosedur penentuan daerah perkotaan berlaku sejak tahun 1980 dan masih berlaku hingga saat ini.
Peserta Berencana (Akseptor) Keluarga	Orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi.
Rasio Jenis Kelamin	Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu.
Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
Status Gizi	

Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Kategori status gizi ini dibuat berdasarkan Standar WHO/NCHS.

Status Pekerjaan

kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.

Tamat Sekolah

Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Tingkat Angkatan

Partisipasi

Kerja Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Penduduk

Pertumbuhan

Angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

SUMBER DATA

Sensus Penduduk (SP)

Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia telah menyelenggarakan 7 kali sensus penduduk yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020.

SP menggunakan dua tahap pencacahan; yaitu, pencacahan lengkap dan pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup semua penduduk yang bertempat tinggal di blok-blok sensus/wilayah pencacahan yang terpilih secara acak dan mencakup sekitar 5 persen rumah tangga.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. Sampai dengan tahun 2010 telah diadakan 40 kali survei. Susenas mengumpulkan data kependudukan, pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan/ lingkungan hidup, kegiatan sosial budaya, konsumsi dan pendapatan rumah tangga, dan perjalanan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik, dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah :

- (a) Konsumsi/Pengeluaran
- (b) Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman
- (c) Sosial Budaya dan Pendidikan.

Sampai tahun 1991 ukuran sampel Susenas beragam dari 25 ribu sampai 100 ribu rumah tangga. Pada tahun 1992, sistem pengumpulan data Susenas diperbaharui, yaitu informasi yang digunakan untuk menyusun Inkesra yang terdapat dalam modul (keterangan yang dikumpulkan tiga tahun sekali) ditarik ke dalam kor

(kelompok keterangan yang dikumpulkan tiap tahun). Pada tahun 1993 ukuran sampelnya menjadi sekitar 205 ribu rumah tangga. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah sampel rumah tangga juga meningkat. Pada tahun 2010, jumlah sampel rumah tangga mencapai lebih dari 300 ribu rumah tangga tepatnya sekitar 304.368 rumah tangga. Peningkatan jumlah sampel tersebut akan memungkinkan dilakukan penyajian data sampai tingkat kabupaten/kotamadya. Dengan adanya peningkatan jumlah sampel tersebut BPS melibatkan mitra statistik selain mantri statistik dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Mulai tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara Triwulan yaitu Triwulan I dilaksanakan bulan Maret, Triwulan II dilaksanakan bulan Juni, Triwulan III dilaksanakan bulan September, dan Triwulan IV dilaksanakan bulan Desember. Setiap Triwulan didistribusikan sampel sebanyak 75.000 rumah tangga. Mulai Tahun 2015, pengumpulan data Susenas dilaksanakan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret dan bulan September.

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pertama kali dilakukan pada tahun 1976 untuk melengkapi data kependudukan khususnya ketenagakerjaan. Sejak tahun 1986-1993, pelaksanaan Sakernas dilakukan 4 kali dalam setahun pada bulan-bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Tetapi mulai 1994-2001 pelaksanaannya dilakukan sekali dalam setahun yaitu sekitar bulan Agustus dengan sampel sekitar 65.000 rumah tangga. Selama periode tahun 2002-2004, Sakernas selain dilakukan secara triwulanan juga dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2005 - 2010 Sakernas dilakukan semesteran dilakukan pada bulan Februari dan November, sedangkan pada tahun 2011 - 2014 kembali dilakukan triwulanan yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Sejak tahun 2015, Sakernas kembali dilaksanakan semesteran yaitu pada bulan Februari dan Agustus.



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA CIMAHI**

Jl. Entjep Kartawiria No. 20B Citeureup Cimahi
Telp/Fax: (022) 6645985, email: bps3277@bps.go.id
Home Page: cimahikota.bps.go.id